

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pendidikan umum yang hanya fokus mengajarkan pendidikan jasmani dan kejiwaan rasional. Pendidikan Islam mengajarkan ilmu-ilmu rasional-empiris dan ilmu-ilmu normatif. Pendidikan Islam berusaha mencerdaskan rasionalitas manusia untuk melakukan aktivitas di dunia dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt. Demikian juga pendidikan Islam berusaha mencerdaskan spritualitas manusia untuk memperdalam dan memperhalus akhlak serta menumbuhkan sikap sopan santunnya dalam menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Dengan demikian, hakikat tujuan pendidikan Islam mencakup, yakni:

- a) mengarahkan manusia menjadi khalifah Tuhan di bumi dengan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan
- b) mengarahkan manusia menjalankan tugas kekhalifahan di bumi sesuai dengan kehendak Tuhan
- c) mengarahkan manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia
- d) membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaniah manusia agar berilmu, berakhlak dan mempunyai skill untuk menjalankan tugas-tugas pengabdian dan kekhalifahan di muka bumi
- e) mengarahkan manusia menjadi pribadi yang bahagia dunia dan akhirat.¹

Tujuan pendidikan Islam itu dapat tercapai dengan baik apabila paradigma pendidikannya yang diselenggarakan berjalan efektif melalui strategi pendidikan berikut: (a) pendidikan bermakna (*meaningfull*) adalah sistem pendidikan yang mengarahkan dan mendidik peserta didik menjadi

¹ Yahdi Rohinah, "Filsafat Pendidikan Islam; Studi Filosofis atas Tujuan dan Metode Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2 No (2016) : 316.

pribadi yang bisa merasakan muatan kurikulum yang diajarkan berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Kebermaknaan ini berhubungan dengan kecerdasan intelektual untuk mengetahui sesuatu dan menumbuhkan rasa ingin tahu secara terus menerus, dan pengembangan potensi diri berupa kematangan dalam memahami, menganalisis, mensintesis, menerapkan dan mengevaluasi, serta kematangan dalam membangun relasi sosial yang dapat membangun interaksi positif; (b) pendidikan integralistik mencakup spiritual, emosional, intelektual dan fisik peserta didik, yang berlangsung secara berkesinambungan, pendidikan spiritual bersamaan dengan perubahan positif emosi dan intelektual, sehingga kematangan spiritual dapat menentukan kematangan emosi. Kematangan intelektual dikembangkan bersamaan dengan kematangan spiritual. Kematangan intelektual dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan rasional dan empiris yang inovatif dan progresif yang bersamaan dengan kematangan spiritual dan (c) pendidikan berbasis nilai (*value basic*) yang memfokuskan pada nilai-nilai dan pertimbangan dimensi etis yang menjadi pendorong perubahan moralitas peserta didik atau manusia.²

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah usaha sadar dalam mendidik manusia agar memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk menjadi insan kamil, yakni manusia paripurna yang dibangun berdasarkan wacana keilmuan (kurikulum) pendidikan agama Islam yang berwawasan keilmuan agama Islam multikultural yang dibangun dari aspek pendidikan yang penuh makna, pendidikan integralistik dan pendidikan berbasis nilai. Bagian dari pendidikan Islam adalah pesantren yang memiliki ciri khas tersendiri.

² Miftahur Rohman & Hairudin Hairudin, "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial-Kultural", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 No 1, (2018): 21.

2. Pesantren dan Perkembangan Ragam Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dari budaya Indonesia dan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial-budaya. Pesantren tetap eksis berperan hingga kini dalam mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada para santrinya dalam sebuah lokasi yang dikenal dengan pondok/asrama santri, yang dilengkapi dengan masjid/mushola, madrasah, bahkan ada rumah kiai/pengasuh, sehingga hubungan santri dan kiai sangat dekat sekali serta egalitarian sesama santri, bahkan dengan lingkungan sekitar karena sejarahnya pesantren itu lahir dari masyarakat, misalnya tanahnya berasal dari hibah atau wakaf dari masyarakat setempat, sehingga pesantren kemudian memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat dan keterikatan layanan pendidikan bagi putra-putri masyarakat sekitar. Dalam dunia pesantren, Madjid mengemukakan muatan keilmuan yang diajarkan di pesantren meliputi ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu Al-Qur'an hadis, bahkan tārīkh atau sejarah kebudayaan Islam.³

Pondok pesantren pada awalnya berfungsi sebagai gerakan pendidikan Islamisasi yang memiliki fokus pada tiga unsur pendidikan, yaitu mengajarkan keimanan dengan membiasakan ibadah, tabligh dengan mengajarkan ilmu dan amal, dan partisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pengajarannya, pondok pesantren berusaha mendidik peserta didik dan masyarakat agar bisa menguasai ilmu agama Islam, yang meliputi di antaranya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu tauhid, bahkan sejarah Islam yang dilakukan dengan membaca kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di surau atau masjid kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Lama kelamaan makin terkenal sang kiai tersebut dan pengaruhnya makin luas sehingga santri berdatangan dari berbagai daerah

³ Mahfudhoh Rif 'Atul et.al., "Multikulturalisme Pesantren di Antara Pendidikan Tradisional dan Modern", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No 1, (2020): 101-103. Dan juga Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam: Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan dan Perkembangannya Masa Kini", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol 14. No 1, (2022): 101.

untuk belajar ilmu agama. Adapun tipologi pesantren dapat dikategorikan menjadi tiga macam: Pertama, pesantren tradisional (*salafiyah*), yaitu pesantren yang mempertahankan sistem pengajaran agama melalui kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 M dengan menggunakan bahasa Arab yang dikenal dengan kitab kuning dan berjalan dengan alamiah yang menentukan kurikulumnya adalah kiai-nya. Kedua, pesantren modern (khalafiyah), yaitu pondok pesantren yang berusaha memadukan pendidikan klasikal dan sekolah ke dalam pengajaran pondok pesantren, sehingga program pengajian kitab-kitab kuning dan juga sekolah berjalan bersama. Ketiga, pondok pesantren komprehensif, yaitu pondok pesantren yang memadukan pengajaran tradisional dan pengajaran modern yang kemudian dilengkapi dengan pengajaran yang memberikan perhatian terhadap masyarakat sebagai tanggung jawab dari keagamaannya, misalnya melengkapi dengan didirikannya pusat pelatihan bisnis, pusat pelatihan pertanian, pusat pelatihan peternakan dan lainnya.⁴

Di Indonesia, pesantren biasa disebut lembaga pendidikan tradisional.⁵ Lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan pesantren pada kenyataannya kini sangat beragam. Lembaga itu memperlihatkan potret sebuah lingkungan pendidikan dengan segala unsurnya, yang secara tradisional berkembang sebagai pusat kegiatan pendalaman ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*). Sementara itu, lembaga pendidikan serupa, karena berangkat dari unsur-unsur modern, tidak disebut sebagai sebuah lembaga pesantren. Kenyataan keragaman pandangan tentang pesantren menuntut pencarian kriteria yang mungkin mempersatukan penyebutan pesantren, jika lembaga pendidikan ini masih akan terus dikembangkan. Kenyataan memang membuktikan bahwa

⁴ M Shodiq, "Pesantren dan Perubahan Sosial", *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No.2 (2021), 110.

⁵ Istilah Tradisional disini maksudnya menurut penulis, pesantren yang merupakan wajah asli Pendidikan Indonesia. Berbeda dengan istilah sekolah yang memang dikenalkan oleh Belanda.

sistem pendidikan pondok pesantren yang berkembang secara dinamis hingga dewasa ini tetap diterima oleh masyarakat.⁶

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang asal usul lembaga pendidikan yang disebut pesantren. Pendapat pertama menyatakan bahwa pesantren merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari praktik pendidikan pra-Islam atau masa kekuasaan Hindu-Budha. Pendapat ini, antara lain diungkapkan oleh Brugmans, Manfred Ziemiek, Nurcholis Madjid dan Denis Lombard. Brugmans dalam kajiannya mengenai asal usul pesantren menyimpulkan bahwa pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan khas berasal dari India yang sebagian dipengaruhi oleh orang-orang Islam.⁷

Ziemek menyatakan bahwa pesantren merupakan hasil perkembangan secara paralel dari lembaga pendidikan pra-Islam yang telah melembaga berabad-abad lamanya. Hampir senada dengan Ziemek, Nurcholis Madjid menyatakan bahwa pesantren memiliki hubungan historis dengan lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha, lalu Islam meneruskan dan mengIslamkannya. Kesamaan antara pesantren dan lembaga pra-Islam, menurut Lombard terletak pada tempatnya yang jauh dari keramaian, Ikatan guru-murid sama dengan kiyai-santri yaitu kebabakan dan terpeliharanya komunikasi antar pesantren.⁸

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Van Bruinessen, dia menyatakan bahwa pesantren memiliki kecenderungan sama dengan sistem pendidikan Islam di Timur Tengah. Dalam tesisnya, ia mengungkapkan Al-Azhar dan *riwaq*-nya merupakan model yang diambil pesantren pada abad ke-18/19 M. Ia juga menyatakan bahwa di

⁶ Mundzier Suparta, *Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat* (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2009), 2.

⁷ .J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*, dalam Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: UGM Press, 1981), 275.

⁸ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 3. Juga sejalan dengan enis Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid III* (Jakarta: Gramedia, 2007), 86.

Kalimantan, Sulawesi dan Lombok muncul lembaga sejenis pesantren pada abad ke-20 M. Namun, pesantren Tegalsari Jawa Timur merupakan salah satu pesantren tertua yang didirikan pada tahun 1742.⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang konsisten membangun karakter bangsa Indonesia yang beradab. Pada proses perkembangannya pesantren mencoba berakulturasi dengan model-model pendidikan di luar pesantren, sehingga menjadi beragam. Hal ini melahirkan klasifikasi terhadap pesantren itu sendiri. Di antaranya adalah pesantren salafiyah, pesantren khalafiyah, pesantren tradisional, pesantren modern, pesantren konvensional, pesantren kontemporer, pesantren entrepreneur.¹⁰

Jenis-jenis pesantren tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Mulai dari corak kurikulum sampai dengan lulusan (*out put*) yang dihasilkan. Hal itu dikarenakan visi yang diusung berbeda meskipun masih dalam satu nafas *syiar* agama Islam. Titik sentral yang menentukan model pesantren dan lulusan pesantren adalah seorang kyai atau pimpinan pesantren. Kyai dituntut memiliki kapasitas pribadi yang sarat dengan bobot kualitatif. Bobot kualitatif inilah yang menjadikan sosok kyai pesantren sebagai rujukan bagi santri dan masyarakat.

Pesantren identik dengan budaya kekeluargaannya. Hubungan batin antara santri dan kyai sangat kuat sebagaimana seorang anak dan orang tuanya. Hal ini diperkuat dengan adanya doktrin bahwa hubungan santri dan kyai sampai nanti di akhirat sehingga apa yang diajarkan dan dicontohkan kyai akan melekat kuat pada santri.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan pesantren yang dimaksud di sini adalah sistem pendidikan khusus yang lahir dari budaya

⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-1, 24. Juga menurut Mundzier Suparta, *Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat* (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2009), 53.

¹⁰ Ibid., 55.

¹¹ Achmad Fatoni, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3. Cet. ke-1.

asli Indonesia yang memiliki karakter tersendiri yang mampu menjadi pertahanan dalam mengajarkan ilmu agama Islam yang berwawasan multikultural yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia terutama di bidang keilmuan Akidah, Ilmu Fikih, Ilmu Al-Qur'an Hadist, dan bahkan Sejarah Kebudayaan Islam.

3. Pendidikan Multikultural

a. Pengertian Multikultural

Multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah beragam kebudayaan.¹² Kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari empat hal yaitu aliran agama, ras, suku dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya tetapi juga keberagaman agama, ras dan etnis.

Dalam bukunya M. Ainul Yaqin, dijelaskan beberapa definisi kultur dari beberapa ilmuwan, yaitu antara lain:

- 1) Elizabeth B.Taylor (1832-1917) dan L.H. Morgan (1872-1917) menjelaskan bahwa kultur adalah sebuah budaya yang bersifat universal terhadap manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat.
- 2) Emile Durkheim (1858-1917) dan Marcel Mauss (1872-1950) menjelaskan bahwa kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat didalam sebuah masyarakat untuk diterapkan.
- 3) Ruth Benedict (1887-1942) dan Margaret Mead (1901-1987) menjelaskan kultur adalah kepribadian yang ditulis dengan luas, bentuk- bentuk dan sekaligus terbentuknya kepribadian tersebut ditentukan oleh kepribadian anggotanya.
- 4) Mery Douglas (1921) dan Clifford Geertz (1926-2006)

¹² A.H. Sanaky Hujar, *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaha 2016), 186

berpendapat bahwa kultur adalah sebuah cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami sikap diri mereka untuk memberi arti pada kehidupan mereka.¹³

Menurut Abdullah, multikulturalisme merupakan pemahaman yang menekankan pada perbedaan dan persamaan budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan multikulturalisme terletak pada kesetaraan budaya.

Berkaitan dengan konteks tersebut, terdapat makna pengakuan dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya berdampingan dengan kehidupan uniknya.¹⁴ Dalam kehidupan multikultural suatu bangsa, masyarakat dituntut untuk menerima keberagaman budaya sebagai realitas dan kehidupan. Dengan demikian akan terwujud dan membuat seseorang terbuka untuk menjalani kehidupan bersama dan kehidupan pribadinya yang lebih baik.

Secara sederhana, multikulturalisme adalah pemahaman yang membenarkan dan meyakini relativisme budaya yang disebabkan oleh keragaman budaya, keragaman etnis dengan ciri-cirinya. Sehingga dasar munculnya multikulturalisme bermuara pada kajian dan kebudayaan. Dari doktrin ini diharapkan akan muncul antusiasme dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya dan akan muncul toleransi lebih lanjut dalam hidup berdampingan dengan keberagaman.

Makna multikulturalisme menegaskan bahwa semua perbedaan pasti sangat diakui. Multikulturalisme diposisikan sebagai respons terhadap keberagaman. Dengan kata lain, keberadaan

¹³ M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, 27-28.

¹⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 75.

komunitas yang berbeda tidaklah cukup, karena yang terpenting komunitas itu dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.

Jika menilik masa lalu, wacana multikulturalisme dalam konteks Indonesia mulai terbentuk plotnya ketika Mukti Ali merumuskan program utamanya yaitu program pembinaan kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia yang dikembangkan dalam bentuk trilogi kerukunan, yaitu kerukunan internal beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan. antara komunitas agama dan pemerintah. Keberhasilan Mukti Ali dalam menjalankan programnya ditunjang oleh latar belakangnya sebagai ahli Ilmu Perbandingan Agama yang sangat diakui di Indonesia.¹⁵

b. Landasan Pendidikan Multikultural

Macam-macam landasan pendidikan multikultural yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Landasan Filosofis

Landasan yang berarti pada pendidikan yang bertujuan untuk ditelaah masalah pendidikan yang penting. Landasan filosofis pada pendidikan berarti hubungan dengan suatu hal yang ada di pendidikan dan berpikiran yang seluas-luasnya. Filsafat berperan pada pendidikan berhubungan dengan keberadaan manusia di dunia, masyarakat dan kebudayaan manusia sebagai makhluk yang dihadapkan dengan tantangan, sehingga diperlukan pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan

¹⁵ S Truna Dodi, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 48.

¹⁶ Indyah Winasih, dkk. *Dasar Pendidikan Multikultural di Indonesia*, Economy Deposit Journal, Vol. 4. No. 2, 2022. 368.

demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berarti interaksi dua atau lebih individu bahkan generasi pada pendelegasian sosiologi seperti tanggung jawab, hubungan sistem pendidikan dengan yudiksi sosial, pendidikan yang bertanggung jawab dalam upaya pemajuan proses sosial dan budaya, masyarakat sebagai tempat berkumpulnya manusia untuk saling berkomunikasi dan taat dengan aturan yang berlaku.

Pendidikan dan masyarakat merupakan dua institusi yang memiliki hubungan relasional interdependensi, dinamika masyarakat bergantung pada proses pendidikan yang terjadi di dalamnya, begitu pula dinamika pendidikan bergantung pada respon masyarakat dalam memandang posisi strategis dunia pendidikan.¹⁷

Pendidikan yang dapat merespon problem masyarakat dan mampu memberikan alternatif solusinya, akan menjadi instrumen yang bermakna bagi dinamika masyarakat. Fenomena radikalisme dalam kehidupan beragama yang berpangkal dari cara pandang masyarakat dalam melihat pluralitas, merupakan bahaya yang harus direspon oleh dunia pendidikan. Pendidikan harus dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat dalam memandang pluralitas. Dalam konteks ini pengembangan pendidikan Islam multikultural, memiliki tempat penting untuk mengarahkan perkembangan individu peserta didik dalam memandang pluralitas dalam kehidupannya, menyiapkan mental peserta didik untuk bersedia menerima keberadaan yang ada dan

¹⁷ Ibid.. 369.

berkembang diluar dirinya. Dalam konteks multikulturalisme, keberagaman dalam masyarakat tidak dilebur dalam satu wadah dengan identitas baru, melainkan masing-masing individu yang berbeda diberi kesempatan yang sama untuk berekspresi, berkembang dan berinteraksi ditengah-tengah masyarakat, dalam suatu ikatan komitmen moral untuk saling menghargai dan toleransi.¹⁸

3) Landasan Psikologis

Landasan psikologis adalah perkembangan pola pikir saat proses pembelajaran sehingga sebagai penentu faktor keberhasilan pendidikan. Pendidikan sebagai perkembangan siswa secara kepribadian supaya kepribadian yang dimiliki menjadi lebih baik.

Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran sampai menjelang kematian, anak selalu berada dalam proses perkembangan, perkembangan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mengemukakan apa yang di didikkan dan bagaimana cara mendidiknya, begitu pula perlu disesuaikan dengan pola-pola perkembangan anak serta karakteristek perilaku individu pada tahap-tahap perkembangan, serta pola-pola perkembangan individu.¹⁹

4) Landasan Yuridis

Bagi bangsa Indonesia, pengembangan pendidikan multikultural merupakan semangat multikulturalisme yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945 dan UUSPN nomor 20 tahun 2003 Pasal 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang

¹⁸ Abdullah Ali, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam as-Salam Surakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 56.

¹⁹ Indyah Winasih, dkk. *Dasar Pendidikan Multikultural di Indonesia*, Economy Deposit Journal, Vol. 4. No. 2, 2022. 370.

merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengandung pesan nilai, moral, etika dan rasa toleransi. Pluralitas yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia, memperoleh tempat yang sama untuk hidup dan berkembang. Demikian pula dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya keanekaragaman budaya bangsa termasuk keanekaragaman keyakinan dan agama.²⁰

5) Landasan Ekonomi

Pendidikan sebagai investasi untuk individu supaya dihasilkan tenaga yang berkemampuan dalam penghasilan suatu produk dan jasa. Hal ini dapat membuat pendidikan sebagai peningkatan ekonomi di suatu negara.²¹

6) Landasan Historis

Landasan historis adalah sejarah proses pendidikan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pendidikan pada zaman dahulu dinilai positif dan berguna sehingga tetap bertahan sampai saat ini.²²

7) Landasan Religius

Pendidikan Islam sebagai proses pembumih ajaran Islam agar umat dapat mengembangkan daya pikir, rasa dan tindakannya sesuai dengan ajaran Islam, maka upaya pengembangan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari landasan orbitnya yaitu Islam itu sendiri, apalagi aktifitas pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Oleh karena itu, peletakan landasan religius dalam pengembangan pendidikan islam berbasis multikultural menjadi

²⁰ Pasal 1 UU No. 20. 2023.

²¹ Ahmad Afif, Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural, *Tadris Volume 7 No. 1 Tahun 2012*. 3.

²² Ibid.. 4.

sangat penting.

Ilmu agama yang berkembang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang beriman. Pendidikan religius merupakan dasar penting landasan pendidikan karena seluruh isi dunia merupakan ciptaan Tuhan dan sudah diwajibkan manusia memiliki keyakinan dan pendidikan agama sebagai penjaga keutuhan zaman.

Dalam perspektif agama, multikulturalisme²³ merupakan basic dari pengembangan pendidikan multikultural, sebagai manifestasi iman di dalam merespon kehendak Allah SWT yang telah dengan sengaja menciptakan keberagaman dalam ciptaan-Nya dengan tanpa maksud menciptakan konflik, melainkan sebagai wahana untuk membangun sikap dan tindakan saling tolong menolong atau saling melengkapi sehingga tercipta suatu kehidupan yang dinamis dan berkesinambungan.²⁴

c. Konsep Dasar Pendidikan Multikultural

Pengertian pendidikan multikultural terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan multikulturalisme. Pendidikan adalah proses mengembangkan sikap dan perilaku seseorang dalam upaya pendewasaan melalui proses pengajaran, pelatihan, dan proses pendidikan. Sedangkan multikulturalisme diartikan sebagai keaneragaman budaya. Dalam pengertian pendidikan multikultural adalah proses pembinaan perilaku seseorang yang menghargai kemajemukan sebagai konsekuensi keberagaman suku, suku budaya dan agama. Oleh karena itu pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan yang menginginkan penghargaan dan

²³ Multikulturalisme merupakan faham yang memandang bahwa pluralism merupakan keniscayaan, bukan hanya mengakui adanya kemajemukan melainkan memberikan ruang sama terhadap keberagaman untuk berkembang. Moh Yamin dan Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi, Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, (Malang: Madani Media, 2011), 22. Lihat juga di Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 126.

²⁴ Ahmad Afif, Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural, *Tadris Volume 7 No. 1 Tahun 2012*. 3.

penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia.²⁵

Konsep pendidikan multikultural muncul karena nilai dasar simpati, toleransi, empati, dan solidaritas sosial. Hasil pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan mencegah konflik antar umat beragama. Konsep pendidikan multikultural tidak bermaksud untuk menciptakan keragaman cara pandang tetapi untuk membangun kesadaran diri akan adanya kemajemukan, untuk menyadari kekurangan diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan.²⁶ Ada dua lapis untuk mengetahui konsep dasar pendidikan multikultural:

- 1) Masalah Kebudayaan, yaitu masalah yang terkait dengan identitas budaya suatu kelompok masyarakat atau suku.
- 2) Kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dan pola kelakuan yang hidup di suatu masyarakat. Kegiatan tertentu dari kelompok-kelompok atau identitas yang melekat pada kelompok tersebut. Secara garis besar, konsep pendidikan multikultural bertujuan untuk memahami perbedaan yang ada dan bagaimana perbedaan tersebut dapat diterima secara wajar dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perilaku yang mencerminkan rasa iri, dengki dan prasangka.

Selain itu ada persoalan-persoalan dasar yang menyangkut upaya pembangunan konsep pendidikan multikultural, yaitu:

- 1) Konsep mengenai kebudayaan misalnya tentang kebudayaan nasional.
- 2) Peranan pendidikan dalam proses pembentukan identitas budaya dan identitas bangsa.
- 3) Hakikat pluralism atau pengakuan terhadap suatu kelompok minoritas

²⁵ Erlan Muliadi, *Urgensi, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No.1, 2012, 55-68.

²⁶ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005, 95.

- 4) Hak bagi setiap orang tua dalam menentukan pendidikan bagi anaknya.
- 5) Nilai-nilai yang akan dipertimbangkan.

Konsep pendidikan multikultural didasarkan pada nilai-nilai dasar simpati, toleransi, empati, dan solidaritas sosial. Hasil dari proses pendidikan multikultural ini diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan mewujudkan upaya penanggulangan dan pencegahan konflik antar umat beragama, radikalisme agama, konflik etnis, perpecahan bangsa. Konsep ini tidak bermaksud untuk menciptakan cara pandang yang seragam tetapi untuk membangun kesadaran diri akan kemajemukan yang tak terhindarkan, mengakui kekurangan diri sendiri dan orang lain guna menumbuhkan sikap untuk mensinergikan potensi diri dengan potensi orang lain dalam kehidupan demokratis dan humanis, sehingga menciptakan kehidupan yang adil, damai dan sejahtera dapat terwujud.²⁷

Secara garis besar, konsep pendidikan multikultural berupaya memahami perbedaan yang ada dan bagaimana perbedaan tersebut dapat diterima secara wajar dan tidak menimbulkan tindakan diskriminatif akibat pola perilaku dan sikap hidup yang mencerminkan rasa iri, dengki, dan prasangka.²⁸

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan belajar dan belajar dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa sehingga tidak ada yang dikorbankan atas nama persatuan. Selain itu, tujuan lain dari pendidikan multikultural adalah membantu peserta didik memahami latar belakang diri dan kelompoknya dalam masyarakat, menghormati dan menghargai keragaman budaya dan sosial sejarah etnis, menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan

²⁷ Ibid., 97

²⁸ Ibid., 99

keterasingan.²⁹

Proses pelaksanaan pendidikan multikultural, lembaga pendidikan harus memperhatikan konsep *unity in diversity*. Dalam proses pendidikan dan penanaman kesadaran bahwa perbedaan dalam kehidupan merupakan kenyataan yang membutuhkan kesadaran bahwa akhlak dan kebaikan dapat lahir dalam konstruksi agama lain. Penanaman konsep ini tidak mempengaruhi keimanan yang diyakini benar oleh siswa. Keberhasilan atau kegagalan pendidikan multikultural dapat dilihat ketika mampu membentuk sikap peserta didik untuk bertoleransi, tidak bertentangan, tidak bermusuhan karena perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama.³⁰

d. Nilai-nilai Multikultural

Nilai adalah prinsip, tujuan, atau standar sosial yang digunakan atau diterima oleh individu, kelas, atau masyarakat. Nilai juga memiliki keterkaitan dengan kebaikan, walaupun keduanya tidak sama mengingat kebaikan tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau sebaliknya.³¹ Nilai bervariasi dalam bentuk yang tidak dapat dikaitkan satu sama lain. Namun demikian, keterkaitan antara proses penilaian tersebut juga akan terlihat dalam suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, nilai bukanlah objek yang konkret, bukan fakta, dan bukan hanya tentang benar atau salah dan membutuhkan bukti empiris, tetapi tentang masalah penghargaan yang diinginkan, disukai, dan tidak disukai.³²

Nilai selalu menjadi sebuah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan. Setiap kali ingin melakukan pekerjaan, perlu untuk membuat pilihan diantara banyak kemungkinan. Nilai menjadi

²⁹ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 199.

³⁰ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 217.

³¹ Agus Zaenul Fitri, "Reinventing, Human Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah", Jogjakarta: Ar-Ruzz, Media, 2012. 87.

³² Subur, "Pendidikan Nilai: Telaah Tentang Model Pembelajaran", *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol, 12, No. 1 Jan-Apr 2007, 1-2

sebuah ukuran untuk memilih tindakan atau tujuan tertentu. Nilai tidak terletak pada barang ataupun sebuah peristiwa, tetapi manusia memasukkan nilai kedalamnya sehingga suatu peristiwa itu mengandung nilai, oleh karena itu, subjeklah yang tahu dan menghargai suatu nilai tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah harapan tentang sesuatu yang mempunyai manfaat, selalu dijunjung tinggi dan sebagai sebuah acuan perilaku bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inti dari pendidikan bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, pluralisme. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup menghormati tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural.³³

Terdapat beberapa nilai yang harus diperhatikan dalam pendidikan multikultural, yaitu:

1) Nilai Toleransi

Yaitu sikap menghormati, menerima pilihan, pandangan, keyakinan, kebiasaan, dan pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya.

Namun perlu digaris bawahi disini, toleransi dalam hal keagamaan bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama-agama lain, seperti halnya kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umat yang beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang toleran dan transformative.

³³ Setya Raharja, Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme, Risalah, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol, 5, No. 1 (UWI, 2019). 10

Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kompromi dalam bekerja sama.³⁴

2) Nilai Kesamaan/Kesetaraan

Yaitu Mengakui adanya persamaan, persamaan hak, dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia. Dalam proses pendidikan, pendidik harus beranggapan bahwa semua siswa adalah sama, tidak mengkhususkan atau membedakan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya.

Jika nilai kesamaan ini dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajar mengajar, antara pendidik dan peserta didik serta keterlibatan lembaga pendidikan.³⁵

3) Nilai Persatuan

Yaitu membentuk pemahaman, pikiran, dan sikap yang mengutamakan keutuhan dan kedaulatan, kebersamaan dan kerjasama.

Apabila nilai persatuan ini dimasukkan di dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu lebih spesial dari peserta didik yang lain, atau sebaliknya menjadikan salah satu peserta didik lebih rendah dari peserta didik yang lain dengan alasan apapun. Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan atau pun perlakuan dari pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri.³⁶

³⁴ Muh. Amin, Pendidikan Multikultural, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 09, No. 1, Tahun 2018. 30.

³⁵ Ibid.. 31

³⁶ Ibid.. 32

4) Nilai Kekerabatan atau Persaudaraan

Yaitu sikap ramah, kekeluargaan lahir dari rasa persaudaraan dan menjadi bagian dari kelompok dan masyarakat itu sendiri. Dengan rasa kekeluargaan ini akan muncul rasa solidaritas, rasa persaudaraan dengan berbagai suku, suku, kelompok dan agama, serta pemahaman akan makna perbedaan.³⁷

5) Nilai Keadilan

Yaitu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga terdapat keseimbangan dan harmoni antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban mengakui potensi yang sama dalam berekspresi dan mengakui persamaan kesempatan dalam pelayanan publik.³⁸

Dengan kata lain adil itu adalah sebuah bentuk dari keseimbangan dan keharmonisan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban, termasuk dalam memberikan kesempatan yang lain untuk menuntut hak dan menjalankan kewajibannya.

e. Tahapan Penanaman Nilai Pendidikan Multikultural

Penanaman nilai seperti dimaksud dalam sub-bab sebelumnya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Thomas Lickona, untuk menanamkan suatu nilai sehingga menjadi karakter tertentu juga diperlukan, beberapa tahapan. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1) *Moral Knowing*

Moral knowing (pengetahuan moral) berhubungan dengan bagaimana seorang individu mengetahui sesuatu nilai yang abstrak. Komponen ini memiliki enam dimensi, yaitu:

a) *Moral Awareness* (kesadaran moral)

³⁷ Setya Raharja, Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme, Risalah, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol, 5, No. 1 (UWI, 2019). 12.

³⁸ Ibid., 15

³⁹ Thomas Lickona, *Educating for Character How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Bookss, 1992), 53-62.

- b) *Knowing Moral Values* (pengetahuan nilai moral)
- c) *Perspective-taking* (memahami sudut pandang lain)
- d) *Moral Reasoning* (penalaran moral)
- e) *Decision-making* (membuat keputusan)
- f) *Self-knowledge* (pengetahuan diri)

2) *Moral Feeling*

Moral feeling (perasaan moral). *Moral feeling* (sikap moral) merupakan tahapan tingkat lanjut, dimana jika pada komponen pertama penekanannya lebih pada aspek pengetahuan/kognitif, maka pada komponen kedua ini lebih ditekankan pada aspek perasaan/afektif, dimana peserta didik dapat merasakan dan mempercayai akan apa yang telah mereka terima pada komponen pertama. Pada komponen ini, juga memiliki enam dimensi, antara lain:

- a) *Conscience* (nurani)
- b) *Self-esteem* (harga diri)
- c) *Empathy* (empati)
- d) *Loving the good* (cinta kebaikan)
- e) *Self-control* (control diri)
- f) *Humility* (rendah hati)

3) *Moral Action*

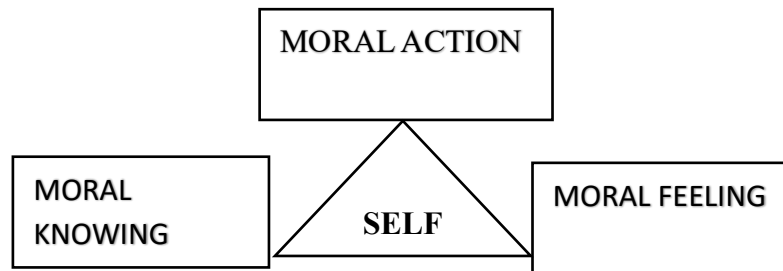
Setelah peserta didik berada pada komponen kedua, selanjutnya *moral feeling* yang telah dimiliki diarahkan untuk dapat masuk pada komponen ketiga, yaitu *moral action* (perilaku moral). Dimana *moral action* (perilaku moral) ini dibangun atas sub komponen/dimensi, yaitu:

- a) *Competence* (kompetensi)
- b) *Will* (keinginan)
- c) *Habit* (kebiasaan)

sehingga ketiga komponen di atas saling terkait satu sama lain.

Hubungan antar ketiga komponen di atas dapat diilustrasikan

sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan antara *Moral Knowing*, *Moral Feeling*, dan *Moral Action* (Sumber: Thomas Lickona, 1992)

Garis yang menghubungkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya menunjukkan bahwa untuk membangun karakter termasuk di dalamnya adalah internalisasi nilai, diperlukan pengembangan ketiga-tiganya secara terpadu. Dengan kata lain, penumbuhan karakter ini tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan tentang yang baik saja, melainkan juga dapat merasakan dan mengerjakannya. Sehingga, pada tataran *moral action* misalnya, agar peserta didik terbiasa (*habit*) memiliki kemauan (*will*) dan kompeten (*competence*) dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural, diperlukan pencipta suasana multikultural di lingkungan setempat dan itu pun menuntut adanya intensitas dan berulang-ulang. Jika tidak, maka yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang berorientasi inklusif kadang-kadang terkalahkan oleh nilai-nilai sebelumnya yang tertanam lebih dahulu yang itu bernuansa inklusif.⁴⁰

Sementara itu, jika penanaman nilai ini disinonimkan dengan internalisasi nilai, maka tahapan yang perlu dilalui pun ada tiga. Tahap-tahap internalisasi nilai dimaksud adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Transformasi Nilai

Pada tahap ini, anak diberikan pemahaman nilai yang

⁴⁰ Sulalah, *Pendidikan Multikultural Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2011), 107.

⁴¹ Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Madia, 1996), 153.

baik dan yang kurang baik kepada peserta didik, yang sematamata merupakan komunikasi verbal.

2) Transaksi Nilai

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi yang bersifat interaksi timbal balik. Kalau pada tahap transformasi komunikasi masih dalam bentuk satu arah, tetapi dalam interaksi ini sudah sama-sama memiliki peran aktif.

Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya dari pada sosok mentalnya. Dalam hal ini, informasi tentang nilai yang baik dan buruk dilaksanakan dan diberikan contoh amalan yang nyata dengan diminta memberikan respon.

3) Transinternalisasi Nilai

Tahap ini jauh lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Dalam tahap ini penampilan pendidik di hadapan peserta didik bukan lagi sosok fisiknya, melainkan sikap kepribadiannya. Demikian pula peserta didik merespon kepada pendidik bukan hanya gerakan fisiknya, melainkan sikap mental dan kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam transinternalisasi nilai ini adalah komunikasi dan kepribadian yang masing-masing terlibat secara aktif.

Adapun proses dari transinternalisasi nilai ini dimulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yang ini bisa dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:⁴²

- a) *Receiving* (menyimak), yakni kegiatan peserta didik untuk bersedia menerima adanya stimulus yang berupa nilai baru yang dikembangkan dalam sikap afektifnya.
- b) *Responding* (menanggapi), yakni kesediaan peserta didik untuk merespon nilai yang ia terima dan sampai ke tahap

⁴² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengaktifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

memiliki kepuasan untuk merespon nilai tersebut.

- c) *Valuing* (memberi nilai), yakni sebagai kelanjutan dari aktifitas nilai menjadi peserta didik mampu memberikan makna baru terhadap nilai yang muncul dengan kriteria nilai yang diyakini kebenarannya.
- d) *Organization of value* (mengorganisasi nilai), yakni aktifitas peserta didik untuk mengatur berlakunya sistem nilai yang ia yakini sebagai kebenaran dalam laku kepribadiannya sendiri sehingga ia memiliki satu sistem nilai yang berbeda dengan orang lain.
- e) *Characterization by a value or value complex* (karakteristik nilai), yakni dengan membiasakan nilai yang benar yang diyakini, dan yang telah diorganisir dalam laku pribadinya sehingga nilai tersebut sudah menjadi kepribadiannya yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupannya.

f. Orientasi Pendidikan Multikultural

Dari beberapa paparan yang telah disajikan, secara sederhana pendidikan multikultural, dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Pendidikan multikultural yang mencoba mengantisipasi berbagai perbedaan dari yang hanya sekedar berbeda, berhadapan, bertolak belakang/berpisah (dichotomis) sampai yang saling berlawanan (confrontative). Pluralitas dan heterogenitas sebagai sebuah realita tidak dapat dipungkiri eksistensinya di dunia ini. Bisa dikatakan bahwa heterogenitas dan pluralitas adalah sebuah hukum alam (*natural law/sunnatullah*). Sebagai sebuah hukum alam, eksistensinya tidak dapat digugat sama sekali. Tugas manusia adalah mengatur berbagai perbedaan tersebut. Pendidikan multikultural sebagaimana dijelaskan di muka, merupakan sebuah pendidikan

alternatif yang menjunjung tinggi dan menghargai berbagai perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan memiliki orientasi yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar dalam perjalanan sejarah pendidikan multikultural nantinya tidak kehilangan arah atau bahkan berlawanan dengan nilai-nilai dasar multikulturalisme. Orientasi yang seharusnya dibangun dan dipertahankan meliputi:⁴³

Pertama, orientasi kemanusiaan. Kemanusiaan atau *humanisme* merupakan sebuah nilai kodrat yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama. Pada dasarnya setiap manusia secara inheren memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani yang paling dalam. Nurani adalah hakim yang paling jujur, adil, berwawasan, dan tidak berkepentingan apa-apa kecuali kepentingan kemanusiaan itu sendiri.

Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal inilah kemudian dibangun institusi pendidikan yang tidak bersifat eksploitatif, mendominasi, kompetisi sebeb-bebasnya. Orientasi yang demikian ini diharapkan memunculkan manusia yang humanis tanpa kehilangan jati dirinya sendiri.

Kedua, orientasi kebersamaan. Kebersamaan atau kooperativisme merupakan sebuah nilai yang sangat mulia dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Kebersamaan yang hakiki juga akan membawa kepada kedamaian yang tidak ada batasnya. Tentunya kebersamaan yang dibangun di sini adalah kebersamaan yang sama sekali terlepas dari unsur kolusif maupun koruptif. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang masing-masing pihak merasa tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, Negara, bahkan merugikan Agamanya.

⁴³ Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural* (Jogjakarta: INSPEAL, 2006), 78.

Dengan kebersamaan yang sangat paripurna inilah diharapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang mendalam, dan terbuka. Tidak ada kebersamaan yang hakiki ketika masing-masing pihak memiliki *hidden agenda* sendiri-sendiri. Karena yang akan terjadi adalah kesaling curigaan dari masing-masing pihak.

Ketiga, orientasi kesejahteraan. Kesejahteraan atau *welvarisme* merupakan sebuah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Kesejahteraan selama ini hanya dijadikan sebagai slogan kosong. Khususnya oleh partai politik. Kesejahteraan sering diucapkan, akan tetapi tidak pernah dijadikan orientasi oleh siapapun. Konsistensi terhadap sebuah orientasi harus dibuktikan dengan perilaku menuju pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pendidikan multikultural yang berorientasi kesejahteraan ini bukan berarti harus terjebak pada pemenuhan kebutuhan materi yang berlebih dan sama banyaknya oleh semua orang. Melainkan yang menjadi orientasinya adalah bahwa masyarakat secara sadar dan tidak dipaksa mengatakan bahwa diri mereka telah sejahtera.

Dengan demikian, bisa saja ada seseorang yang meskipun secara materi dan ekonomi itu pas-pasan atau cukup, akan tetapi dia merasa sejahtera. Rasa sejahtera ini diharapkan dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Tentunya dengan perlakuan yang manusiawi. Manusia pada dasarnya sudah merasa sejahtera ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi, dihargai dan diakui oleh orang lain dan diberlakukan sebagai manusia.

Keempat, orientasi proporsional. Proporsional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif, dan tepat tujuan. Ketetapan di sini tidak diartikan sebagai ketepatan yang bersifat *rigid* dalam arti hanya menggunakan salah satu pertimbangan, misalnya

pertimbangan kualitas intelektual, atau kuantitasnya, melainkan ketepatan yang ditinjau dari semua sudut pandang, khususnya yang berkaitan langsung dengan nilai proporsional, sehingga semua pihak dapat menerima dengan baik, lapang dada, dan tidak menimbulkan kasak-kusuk di belakang.

Kelima, orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasis dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang. Misalnya kebenaran yang didasarkan pada hasil metode ilmiah dengan melalui *hipotetiko-logiko-verifikatif*, sehingga kaum positivis tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang tidak sama atau tidak sepakat bahkan menolak kebenaran positif tersebut. Pemaksakan kehendak untuk menerima pendapat, pemikiran, teori, kebijakan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem pendidikan dan sebagainya adalah tidak sesuai dengan pendidikan multikultural.

Jika sikap-sikap tersebut tidak dieliminir, maka penghilangan generasi suatu kelompok sampai yang tak berdosa sekalipun akan sering muncul. Penghapusan etnik, penganut agama, kelompok masyarakat, atau bahkan penghilangan Negara tertentu akan menjadi fenomena yang biasa dan wajar. Padahal semua itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai orientasi utama pendidikan multikultural ini.

Keenam, orientasi anti hegemoni dan anti dominasi. Dominasi dan hegemoni adalah dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Hanya saja kedua istilah tersebut tidak pernah digunakan atau bahkan dihindari jauh-jauh oleh para pengikut paham liberalis, kapitalis, globalis dan neoliberalis. Hegemoni bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Karena dewasa ini, yang menjadi penguasa dan menjadi

perhatian utama adalah kaum berduit. jutawan, miliarder, atau bahkan triliuner menjadi impian semua orang, sehingga merekalah yang akan mendapatkan pelayanan *very important* (VIP), sementara kaum *cilik*, miskin, terbelakang, kalah kompetisi, dan bodoh selalu disisihkan bahkan dilecehkan. Model interaksi sosial yang demikian inilah yang diharapkan dibangun dalam pendidikan multikultural.⁴⁴

Dari uraian orientasi pendidikan multikultural yang telah dipaparkan, jika semua itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam sistem pendidikan Negara ini maka sikap fanatisme buta, fundamentalisme picik, radikalisme, anarkhisme membabi buta, bahkan terorisme dapat dihindari atau bahkan dihilangkan sama sekali. Tentunya semua itu memerlukan tanggapan, dukungan, bantuan, tahapan, dan tindakan real untuk melaksanakan pendidikan multikultural dengan sebaik-baiknya. Reduksi kemanusiaan (*dehumanisasi*) yang selama ini terus muncul harus dicegah dengan tindakan nyata, akan tetapi tidak melalui kekerasan dan anarkhisme yang menjadi ciri khas dehumanisasi itu sendiri.

Orientasi-orientasi tersebut, tentunya berangkat dari hakikat ontologi pendidikan multikultural sendiri. Keterkaitan antara hakikat dan orientasi perlu terus dijaga. Sebab kesenjangan yang selama ini terjadi disebabkan oleh adanya kesenjangan antara slogan pendidikan yang mampu mengentaskan seluruh umat manusia, namun pada kenyataannya justru telah terjadi eksploitasi yang sangat luar biasa dan besar-besaran. Sampai-sampai manusia itu sendiri tereduksi di dalamnya tanpa mampu keluar dari lingkaran setan (*the satanic circle*) modernisasi dan liberalisasi.

Lihua Geng memberikan analisis kritis terhadap pendidikan multikultural yang tidak hanya membentuk sikap harmonis dan dapat saling menghargai antara sesama siswa yang berbeda latar belakang.

⁴⁴ Ibid.. 80

Namun juga membentuk siswa mampu berpikir kritis di tengah-tengah perbedaan.⁴⁵

Selain itu penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat menciptakan pengaruh ke dalam empat faktor yaitu; (1) gerakan hak asasi manusia, (2) meningkatnya kesadaran kesukuan, (3) analisis lebih kritis terhadap buku teks dan bahan-bahan lainnya, (4) hilangnya kepercayaan terhadap pandangan/teori tentang kekurangan budaya. Sedangkan karakteristiknya adalah proses pendidikan yang berkelanjutan dan dinamis, proses pembelajaran yang kritis antara guru dan murid, anti rasisme, integrasi atas semua komponen pendidikan, meresap dalam proses pendidikan secara keseluruhan. semua itu menjadi sangat penting bagi siswa yang minoritas maupun mayoritas untuk menciptakan keadilan sekolah.⁴⁶

James A. Banks lebih merinci ada delapan karakter yang menunjukkan sebagai sekolah multikultural; (1) sikap, persepsi, kepercayaan, dan tindakan staf sekolah yang menunjukkan inklusif. Staf sekolah mempunyai harapan tinggi dan bersikap positif kepada semua siswa; (2) formulasi kurikulum pendidikan yang mencerminkan pengalaman, budaya, dan berbagai perspektif kelompok etnik, budaya yang berbeda; (3) model pembelajaran yang sesuai dengan karakter belajar, budaya dan motivasi siswa; (4) staf sekolah menunjukkan adanya penghormatan terhadap bahasa dan dialek asli siswa; (5) materi pembelajaran menunjukkan konsep, situasi, keadaan yang mencerminkan dari berbagai perspektif kelompok ras, budaya dan etnik; (6) hal yang menjadi ukuran

⁴⁵ Lihua Geng, *Reflection on Multiculture Education Under The Background Of Globalization*, Journal Higher Education Studies, Vol. 3, No. 6, (2013), 53-57. Begitu pula Aneta Barakoska menambahkan pendidikan multikultural sebagai proses penyadaran untuk mengakui terhadap perbedaan pandangan hidup, keyakinan, dan status sosial. Dilihat, Aneta Barakosa, *Multiculturalism As Important Characteristic of Contemporary Education*, IJCRSEE, Vol. 1 No. 1 (2013).

⁴⁶ Hasan Arslan, *Multicultural Education: Approaches, Dimesions and Principles, in Multicultural education From Theory to Practice*, eds. Hasan Arslan dan Georgate Rata (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013), 18.

evaluasi belajar adalah kepekaan terhadap budaya dan menunjukkan proporsionalitas terhadap bakat siswa; (7) budaya dan kurikulum sekolah mencerminkan perbedaan; (8) guru konseling di sekolah mempunyai harapan tinggi kepada semua siswa terhadap tujuan positif karir mereka.⁴⁷

James A. Banks menyatakan Ada lima dimensi yang harus dikembangkan di dalam pendidikan multikultural.

1) *Content Integration* (dimensi integrasi isi/materi)

Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam materi pelajaran atau disiplin ilmu. Yang digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan “poin kunci” pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusi, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Disamping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajaran tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.⁴⁸

2) *The Knowledge Construction Proces* (Dimensi Konstruksi Pengetahuan)

Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah materi mata pelajaran (disiplin). Berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.

3) *An Equity Paedagogy* (Dimensi Pendidikan yang sama/adil)

⁴⁷ James A. Banks, *An Introduction Multicultural Education*, (Allyn and Bacon, 2002), 36.

⁴⁸ Ibid.. 37

Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi budaya, ras ataupun social. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, Wanita dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

4) *Prejudice Redaction* (Dimensi Pengurangan Prasangka)

Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berintegrasi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik

(5) *Empowering School Culture and Social Structure* (Dimensi Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial)

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk Menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragaman sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, Latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan

penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada disekolah.

Kelima dimensi ini tentu sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan multikultural, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan dimensi-dimensi lain yang tak terbatas.

Lain halnya dengan James A. Banks yang menyebutkan bahwa terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan multikultural, yaitu: kontributif, aditif, transformatif dan aksi sosial.

1) Pendekatan kontributif

Yang dimaksud dengan pendekatan kontributif ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktifitas-aktifitas tertentu seperti hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan dari berbagai macam kebudayaan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keragaman kelompok, sehingga dapat dikembangkan dengan cara menawarkan muatan khas yang dapat dengan segera diakui dalam berbagai varian pendidikan multikultural, misalnya menggabungkan peringatan hari-hari besar keagamaan dengan hari kepahlawanan nasional.

2) Pendekatan aditif

Pendekatan aditif ini merupakan bentuk penambahan muatan-muatan, tema-tema dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan kata lain, pendekatan ini melibatkan upaya memasukkan literatur dari berbagai kebudayaan ke dalam *mainstream* kurikulum. Misalnya, memanfaatkan muatan khas multikultural seperti tema-tema tentang ko-eksistensi, pro eksistensi, saling menghargai, saling memahami sebagai pemer kaya bahan ajar.

3) Pendekatan transformatif

Pendekatan transformatif ini adalah mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum atau membuat kurikulum baru di mana konsep-konsep, isu-isu, serta permasalahan-permasalahan didekati dengan pendekatan *muqaran* (perbandingan) untuk memperbarui pemahaman dan berbagai perspektif serta sudut pandang. Penerapan pendekatan ini berimplikasi pada penciptaan kurikulum dengan mengakomodir kelompok-kelompok dengan latar budaya yang berbeda, baik yang *mainstream* maupun yang sempalan. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuka perspektif kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya (outsider) untuk memberi komentar dan penjelasan terhadap materi yang dibahas.

4) Pendekatan aksi sosial

Pendekatan aksi sosial ini merupakan gabungan dari pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan memperkaya ketrampilan peserta didik dalam melakukan aksi sosial seperti resolusi konflik, rekonsiliasi keberagaman, dan perbedaan budaya. Penerapan pendekatan ini tidak hanya mengikutsertakan peserta didik untuk memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, melainkan sekaligus juga dilibatkan dalam melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut.⁴⁹

Dari keempat pendekatan diatas, sudah jelas antara pendekatan pertama dan seterusnya, hingga pada pendekatan yang terakhir adanya suatu tingkatan yang saling terhubung. Artinya, pendekatan aditif secara tidak langsung mengakomodir pendekatan kontributif. Kemudian pendekatan transformatif juga di dalamnya ada

⁴⁹ James A. Banks, *An Indroduction Multicultural Education*, (Allyn and Bacon, 2002), 32.

pendekatan kontributif dan aditif. Sementara, dalam pendekatan aksi sosial, semua jenis pendekatan sebelumnya, yaitu kontributif, aditif, serta transformatif *ter-cover* di dalamnya. Tidak hanya meng-*cover*, tapi juga menambahkan aktivitas-aktivitas kongkrit dalam rangka menumbuhkan kesadaran multikultural melalui ranah pendidikan. Dari pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian bisa memunculkan model-model pengembangan pendidikan multikultural. Apakah pendidikan multikultural itu dengan model kontributif, aditif, transformatif atau aksi sosial.

Selanjutnya menurut H.A.R. Tilaar, implementasi pendidikan multikultural dapat melalui lima program prioritas. Pertama, lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya. Lembaga pendidikan selain sebagai pusat belajar dan mengajar (*intellectual development*) juga merupakan pusat penghayatan dan pengembangan budaya lokal, nasional maupun global. Kedua, melalui pendidikan kewargaan. pendidikan ini titik tolaknya budaya dalam lingkungan peserta didik yang kemudian akan bermuara kepada nilai-nilai budaya nasional. Ketiga, melalui kurikulum pendidikan multikultural. Otonomi sekolah memberikan kesempatan untuk menyusun kembali kurikulum yang berbasis multikultural yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, kebijakan penyebaran informasi. Kebijakan ini penting karena dapat member petunjuk bagi anak didik untuk memilih dan menerima informasi-informasi baik dari guru, buku-buku, dan teknologi informatika. Kelima, melalui pendidikan guru. Kompetensi guru dalam hal ini signifikan sekali pengaruhnya terhadap penanaman nilai-nilai multikultural anak didik.⁵⁰

Dalam pendidikan multikultural, proses penanaman sikap multikultural dilaksanakan serentak bersamaan dengan penanaman dengan pendidikan karakter bagi peserta didik. Dengan selalu

⁵⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 223-232.

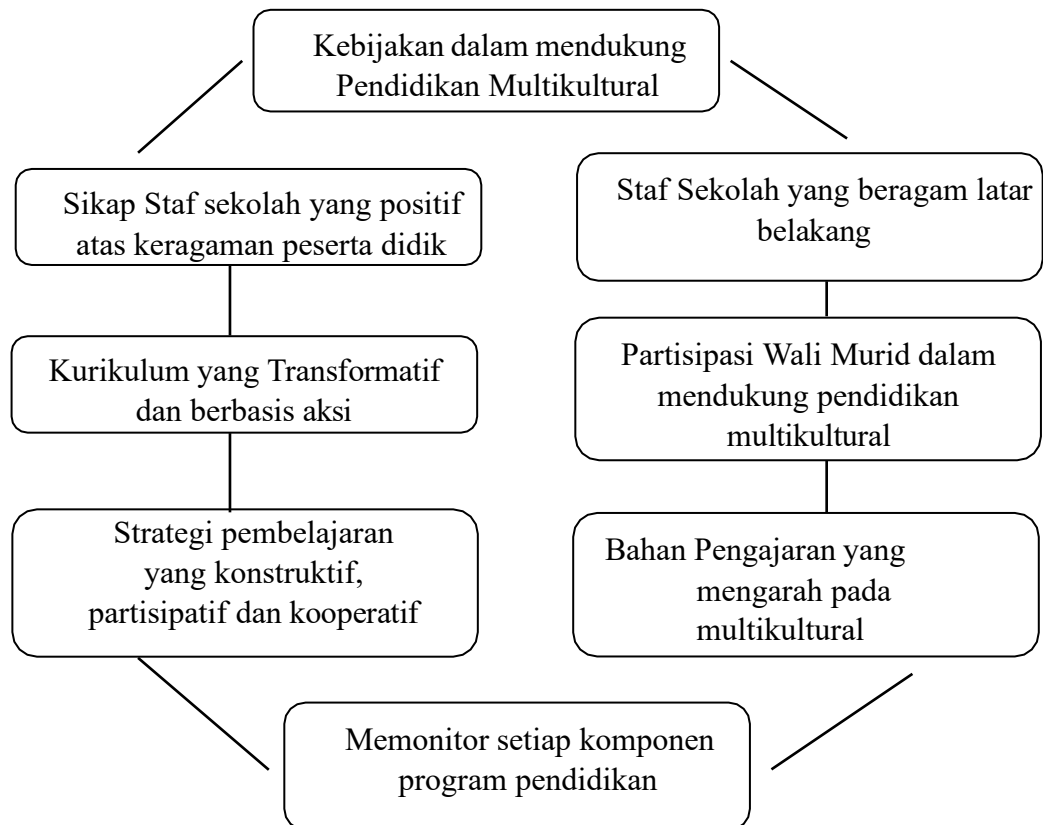
menjunjung tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri untuk menciptakan pribadi yang memiliki karakter yang utuh. Tujuannya dapat dicapai dengan cara membentuk dan mengembangkan aspek fisiologis, sosial, emosional, agamis, bersikap kreatif dan peningkatan intelektual yang optimal bagi peserta didik, serta menumbuhkan semangat belajar dan mengembangkan diri pada peserta didik.

Kemudian proses pembelajaran dapat bersifat kontekstual maupun tekstual, namun tidak melupakan untuk mengaitkannya pada kehidupan nyata sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan lingkup yang lebih luas. Prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdiri dari keadilan, toleransi, keberagaman, keseimbangan dan keteladanan harus dipahami oleh peserta didik dalam pendidikan multikultural bukan hanya bersifat tekstual maupun bersifat kontekstual. Hal ini dikarenakan pembelajaran kontekstual dapat dikatakan lebih bermakna dan efektif untuk menginternalisasikan pendidikan multikultural bagi peserta didik. Baik dari aspek kognitif peserta didik, aspek afektif maupun psikomotorik guna mewujudkan prinsip pendidikan multikultural di kehidupan sehari-hari.⁵¹

⁵¹ Yordan Nafa, Moh Sutomo, Mashudi Mashudi, Wawasan Moderasi Beragama dalam Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*. Vol.7. No.1, 2022. 73.

Berikut adalah bagan standar implementasi dari Pendidikan multikultural.

Tabel 1.1
Standar dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural.



g. Multikultural dalam Tinjauan Islam

Kemajemukan dan keragaman budaya adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Kita hidup di dalam keragaman budaya dan merupakan bagian dari proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Ia menyusup dan menyangkut dalam setiap seluruh ruang kehidupan kita, tak terkecuali juga dalam hal kepercayaan. Kemajemukan dilihat dari agama yang dipeluk dan paham-paham keagamaan yang diikuti, oleh Tuhan juga tidak dilihat

sebagai bencana, tetapi justru diberi ruang untuk saling bekerjasama agar tercipta suatu sinergi.⁵²

Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Maidah ayat 48:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan' (Q.S. al-Maidah, 5:48).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perbedaan dan kemajemukan itu adalah *sunnatullah* (keputusan Allah). Tugas manusia adalah berbuat baik dengan maksimal tanpa memandang perbedaan. Bersinergi dan bekerjasama membangun peradaban untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak malah saling menjatuhkan apalagi bermusuhan. Jika permusuhan terjadi maka seorang manusia telah gagal mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an.

Di samping itu, kita juga menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing, bahkan tidak hanya itu, kita pun menghadapi orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Dalam menghadapi kemajemukan seperti itu tentu saja kita tidak mungkin mengambil sikap anti pluralisme. Kita harus belajar toleran terhadap kemajemukan. Kita dituntut untuk hidup di atas dasar dan semangat pluralisme agama.⁵³

Agama Islam mendidik pemeluknya agar dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Hal tersebut senada dengan prinsip yang ada dalam multikulturalisme. Dalam literatur Islam, Islam sangat menaruh

⁵² Achmad Fatoni, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

⁵³ Johan Effendi, *Kemusliman dan Kemajemukan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 61.

perhatian (*concern*) terhadap segala budaya dan tradisi (*urf*) yang berlaku di kalangan umat manusia dalam setiap waktu dan kondisi, baik yang bersifat umum atau hanya berlaku dalam satu komunitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ketetapan-ketetapan dalam Islam yang berdasarkan *urf* yang berlaku.

Secara garis besar dalam agama Islam terdapat dua aspek yang saling melengkapi. Pertama, aspek luar, lahiriyah, simbol, kulit, dan bentuk formalisme yang kemudian menjadi identitas dan sekaligus alat untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Aspek ajaran yang bersifat lahiriyah ini dalam ajaran Islam, misalnya terlihat pada ajaran yang terdapat dalam rukun Islam mulai dari shahadat yaitu pengakuan bahwa hanya Allah sajalah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya, salat, puasa, zakat, dan haji.

Kedua, aspek dalam, batiniyah, substansi, dan isi, yaitu pesan moral, etika dan nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam ajaran yang bersifat lahiriyah tersebut. Shahadat mengajarkan agar manusia memiliki komitmen yang kokoh untuk senantiasa berorientasi pada nilai-nilai luhur dan universal yang berasal dari Tuhan.

Selanjutnya dalam salat terdapat ajaran tentang perlunya membangun komitmen dan hubungan vertikal dengan Tuhan dalam rangka pencerahan spiritual sehingga terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar, dan ketika salat tersebut dilaksanakan secara berjama'ah, maka didalamnya terdapat ajaran tentang pentingnya hidup bermasyarakat, saling mengenal, dan peduli terhadap lingkungan.

Dalam ajaran puasa terdapat ajaran agar manusia senantiasa merasa dekat dengan Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu, peduli terhadap orang yang selalu kelaparan. Kemudian dalam berzakat terdapat pesan ajaran tentang pentingnya membangun hidup yang seimbang antara pemenuhan terhadap kepentingan diri

sendiri dan kepentingan orang lain. Kemudian dalam ibadah haji terdapat ajaran tentang pentingnya budaya memahami keragaman budaya, saling kenal mengenal dengan berbagai bangsa di dunia, serta menjadi manusia yang senantiasa berakhlak mulia.⁵⁴

Dengan demikian di balik aspek lahiriah dari agama terdapat aspek batiniyah yang pada intinya ajaran tentang moral, etika, dan budi pekerti. Atas dasar ini, kiranya cukup berdasar apa yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, bahwa inti ajaran agama adalah moral yang bertumpu pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dilihat dari segi fungsinya ajaran moral dan etika tersebut ada yang terkait dengan Tuhan dan dengan manusia. Di antara ajaran moral dan etika yang terkait dengan manusia, khususnya dalam rangka mewujudkan konsep pendidikan multikultural adalah ajaran tentang keadilan, musyawarah, egaliter, dan toleransi.⁵⁵

Islam multikultural adalah Islam yang berwajah senyum, ramah, kasih sayang, toleran dan nilai-nilai Islam yang dibangun dengan latar belakang pola pikir yang lurus dan pertengahan serta berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, selalu memiliki sikap harmonis terhadap masyarakat dalam berinteraksi, sehingga mengedepankan perdamaian dan sikap anti kekerasan dalam berdakwah.⁵⁶

Ajaran tentang keadilan ini termasuk ajaran yang amat ditekankan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, kata adil dijumpai dalam banyak konteks ayat. Misalnya dalam adil dalam konteks berpoligami (Q.S. al-Nisa', 4:3, 129, dan 135); dalam konteks etika profesi (Q.S. al-Maidah, 5:8) yakni seseorang tidak boleh berlaku tidak adil yang disebabkan atas kebenciannya kepada seseorang yang akan menjadi

⁵⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 78-80.

⁵⁵ Fazlur Rahman, *Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998, 90.)

⁵⁶ M. Syamsul Huda dan Yoga Irama, Resiliensi Muslim Moderat di Era *Post Truth*: Tipologi, Teori dan Praktik Di Indonesia, *el-Buhuth*, Vol.3, No.2, 2021. 243

objek atas kebijakannya, dalam konteks ketaqwaan yakni adil mendekatkan seseorang kepada ketaqwaan (Q.S. al-Maidah, 5:8), dalam konteks sebagai seorang juru tulis atau notaris (Q.S. al-Baqarah, 2:282), dalam konteks sebagai syarat seorang hakim memutuskan sebuah perkara (Q.S. al-Nisa, 4:58), dalam konteks sebagai akhlak yang mulia sebagaimana akhlak berbuat baik kepada para karib kerabat (Q.S. al-Nahl, 16:90), dalam konteks sebagai syarat seorang yang mendamaikan orang yang bertengkar (Q.S. al-Hujurat, 49:9). Dari keseluruhan ayat-ayat tersebut terlihat bahwa keadilan digunakan dalam konteks hubungan dengan orang lain.

Selanjutnya ajaran musyawarah, yakni sikap yang memerhatikan pendapat orang lain dalam memutuskan perkara. Ajaran musyawarah ini dekat dengan ajaran tentang demokrasi dalam arti bukan demokrasi yang liberal, melainkan ajaran demokrasi yang dibatasi oleh hukum yang berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan. Di dalam Al-Qur'an ajaran musyawarah dihubungkan dengan memutuskan suatu perkara (Q.S. Ali Imran, 3:159) dan al-Syura, 43:38) bahkan juga musyawarah digunakan pula ketika akan menghentikan (menyapih) seorang anak dari menyusui sebelum dua tahun (Q.S. al-Baqarah, 2:223).

Adapun ajaran egaliter terkait dengan sikap menganggap sederajat dengan orang lain yang berbeda agama, bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya. Mereka yang mengamalkan ajaran egaliter tidak akan merendahkan orang lain yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan tersebut. Ajaran ini misalnya dijumpai pada Q.S. al-Hujurat, 49:13. Berdasarkan ayat ini maka perbedaan yang terdapat di masyarakat bukanlah untuk dipertentangkan atau untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling disinergikan. Dengan cara demikian, maka kekurangan yang ada pada orang lain dapat kita tutupi dengan kelebihan yang ada pada kita, dan kelebihan pada orang lain dapat menutupi kekurangan pada diri kita. Kenyataan hidup

menunjukkan bahwa berbagai kebutuhan hidup yang diperlukan oleh seseorang hanya dapat dipenuhi dengan bantuan orang lain.

Ajaran tentang egaliter tersebut juga diperlukan dalam menyikapi pluralisme agama, budaya, jenis kelamin, kebangsaan, suku, etnis, dan lain sebagainya yang selanjutnya membawa kepada ajaran tentang toleransi. Ajaran ini dapat dijumpai dalam Q.S. al-Kafirun, 109:6. Ajaran ini selanjutnya akan membawa kepada kehidupan yang penuh toleransi dan harmoni.

Multikulturalisme juga senada dengan tujuan agama yang berbunyi: Tujuan umum syari'ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-daruriyyah*) serta pemenuhan kepentingan (*al-hajiyyat*) dan penghiasan (*tahsiniyyah*) mereka. Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), kehormatan (*al-irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).⁵⁷

4. Deradikalisasi

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Berikut ini adalah ciri-ciri sikap dan paham radikal: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa paling benar sendiri, dan menganggap orang lain itu salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam pada umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).⁵⁸

Perkataan radikal berasal dari bahasa latin “radix” yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim,

⁵⁷ Abd Al-Wahhab *Khalaf*, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam), 198.

⁵⁸ Nur Salim Suryanto, “Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN 1 Kediri”, *dalam Jurnal ABDINUS Vol. 2, No. 1, 2018*, 99.

menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.⁵⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai “paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara drastis.”⁶⁰ Dengan demikian radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang terjadi.

Ayzumardi Azra menegaskan bahwa yang dimaksud radikalisme Islam adalah ide-ide, pemikiran, ideologi dan gerakan Islam yang mengarah kepada aktivitas intimidasi, kekerasan dan teror, baik karena doktrin keagamaan, membela diri, maupun bentuk respons terhadap lawan politik yang ditunjukkannya. Radikalisme tidak hanya dibatasi oleh sikap dan tindakan keras semata, radikalisme merupakan bentuk perlawanan dari individu kepada individu atau kelompok lain yang berseberangan melalui pemikiran maupun tindakan-tindakan intimidasi.⁶¹

Menurut Masdar Hilmy, terdapat beberapa karakteristik bagi paham keagamaan Islam radikal, yaitu:

- a. Menghendaki pelaksanaan hukum Islam dan norma-normanya secara komprehensif dalam kehidupan, sesuai apa yang dimodelkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga memiliki sikap keberagamaan yang fanatik. Menurut Masdar Hilmy, paham radikal menekankan visi Islam sebagai doktrin agama dan sebagai praktik sosial sekaligus mengintegrasikan antara *din*, *dunya* dan *dakwah* berlandaskan Al-

⁵⁹ Nuhrison M. Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia”, *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 07 No. 31, 2009. 36

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 719.

⁶¹ Afandi, “Menghadang Radikalisme di Bumi Nusantara”, *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1, 2016, 73-87.

Qur'an dan Sunnah. Puncak dari keyakinan ini adalah pendirian “negara Islam”.⁶²

- b. Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait hubungan sosial, perilaku keagamaan dan hukuman kejahatan secara literal-tekstual. Penafsiran rasional-kontekstual tidak diperlukan sepanjang Al-Qur'an telah menyatakan secara eksplisit. Paham ini menilai semua yang tidak dimunculkan Al-Qur'an bernilai bid'ah, termasuk konsep barat semisal demokrasi dan lainnya. Di sini, penggunaan simbol-simbol Islam menjadi determinan karakter paham ini, pada saat yang sama pemurniaan Islam menjadi teologi yang dipertahankan.⁶³
- c. Model penafsiran literal-tekstual memunculkan sikap intoleransi terhadap semua paham atau keyakinan yang bertentangan dengannya, sekaligus bersikap eksklusif dengan membedakan diri dari orang kebanyakan. Sikap intoleransi di dasarkan pada pendekatan *Manichean* atas realitas. Dalam pendekatan ini, dunia hanya berisi dua hal, yaitu baik-buruk, halal-haram, iman-kufur, dan seterusnya, dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum lain, semisal sunnah-makruh dan mubah. Adapun sikap eksklusif munculnya karena “menutup” atas pengaruh luar yang dinyatakan sebagai ketidakbenaran.⁶⁴
- d. Interpretasi di atas menghasilkan pandangan yang revolusioner, yaitu ingin mengubah secara terus menerus, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan kekerasan, selama tujuan yang diinginkan belum tercapai.

Adapun faktor penyebab terjadinya radikalisme Islam dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, faktor agama, yaitu sebagai bentuk purifikasi ajaran Islam dan penegakan khilafah Islamiyah di muka bumi. Terdorongnya semangat Islamisasi secara global ini tercetus sebagai satu-

⁶² Masdar Hilmy, “The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamits to Deradicalization Project in Indonesia”, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No.1, 2013 M/1434, 133.

⁶³ *Ibid.*, 134.

⁶⁴ *Ibid.*, 136.

satunya solusi untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang muncul dari golongan radikal dipandang sebagai akibat semakin menjauhnya manusia dari agama.

Kedua, faktor sosial-politik. Di sini terlihat jelas bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim menyebabkan terjadinya gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen dan emosi keagamaan.⁶⁵

Ketiga, faktor pendidikan. Minimnya porsi pendidikan keagamaan, utamanya porsi pendidikan yang berpaham Aswaja mengakibatkan minimnya informasi pengetahuan yang didapat, sehingga dengan kurangnya dasar keagamaan tersebut mengakibatkan seseorang mudah menerima informasi keagamaan dari orang yang dianggap tinggi keilmuannya tanpa dicerna terlebih dahulu. Hal ini akan menjadi bumerang jika informasi tersebut didapatkan dari orang yang salah. Pada akhirnya pemahaman tersebut akan menjerumuskan dirinya pada *truth claim* yang membabi buta. Menganggap semua yang di luar pendapatnya adalah salah dan boleh diperangi.

Keempat, faktor kultural. Barat dianggap oleh sebagian kalangan muslim telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya, sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa timur dan Islam juga dianggap bahaya terbesar keberlangsungan moralitas Islam.⁶⁶

Kelima, faktor ideologis anti westernisasi. Westernisasi merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dan mengaplikasikan syariat Islam sehingga simbol-simbol barat harus

⁶⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 18.

⁶⁶ Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: 1992), 95.

dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Sedangkan menurut Darmadi, mengutip pendapat Mohammad Tholhah Hasan, bahwa kemunculan Islam radikal sesungguhnya berasal dari berbagai faktor lain, terutama setelah datangnya era reformasi disebabkan variable ajaran pemahaman, peranan media internet (IT), kondisi sosial domestik, dan konstelasi politik internasional.⁶⁷

Menurut Adian Husaini, kriteria Islam radikal diantaranya adalah: pertama, mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Kedua, dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak sedikit pula dengan cara kasar terhadap kegiatan kelompok-kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketiga, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas. Keempat, kelompok Islam radikal seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.⁶⁸

Sementara itu, deradikalisasi adalah sebuah proses untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, pluralis dan moderat. Dengan demikian, deradikalisasi adalah *counter* radikalisasi. Jika radikalisasi melahirkan radikalisme yang ditandai dengan sikap kaku, keras, tanpa kompromi, maka deradikalisasi ditujukan untuk menjadikan seseorang menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat. Hal yang perlu digaris bawahi dari radikalisasi dan

⁶⁷ Ahmad Darmadi, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam Indonesia", *Jurnal Millah*, Vol. XI, No. 1, 2011. 236.

⁶⁸ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 243.

deradikalisasi adalah keduanya memerlukan sebuah proses pengenalan, penanaman, penghayatan dan penguatan.⁶⁹

Deradikalisasi bukan hanya dikembangkan dalam pengertian sebagai upaya rehabilitasi, tetapi juga sebagai upaya kontra ideologi atau deideologisasi (*deideologization*). Dengan demikian, program deradikalisasi dapat melakukan pencegahan semenjak dini terhadap pengaruh-pengaruh ideologi radikal. Deradikalisasi tidak hanya ditekankan pada para pendukung gerakan terorisme, para mantan pelaku teror dan mereka yang menjadi tahanan saja. Namun, deradikalisasi juga harus diperluas kepada organisasi ataupun lembaga masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis. Seperti sekolah, pesantren, ormas-ormas, organisasi kepemudaan, karang taruna, dan lain sebagainya.⁷⁰

Di sisi lain, penanganan radikalisme yang terlalu bertumpu pendekatan legal formal dan bersifat represif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah perlu ditinjau ulang, karena logika pendekatan melalui mekanisme hukum berlawanan dengan logika yang dianut oleh para teroris. Dalam 12 tahun terakhir pemerintah sudah menangkap 750 lebih tersangka teroris dan 70 lebih ditembak mati, termasuk para gembongnya. Sanksi pidana fisik tidak membuat pelaku berhenti, tetapi para teroris bertindak jauh melampaui rasa takut terhadap ancaman hukuman tersebut. Mengingat bahwa kekerasan yang dilakukan saat ini pada umumnya berdasarkan ideologi agama, maka diperlukan pula gambaran etnis berdasarkan aspek kultural religinya. Memang ada yang mengatakan bahwa sekarang ini perang melawan radikalisme dan terorisme sudah memasuki kawasan yang lebih substantif, yakni tidak semata-mata konflik fisik, melainkan sudah memasuki kawasan konflik

⁶⁹ Kaswadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1, 2014. 142.

⁷⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013). 80.

gagasan atau adu kekuatan untuk merebut hati dan pikiran. Itulah perang gagasan dan ideologi tentang terorisme dan *counter of terrorism*.⁷¹

Deradikalisasi merupakan suatu strategi yang didasari oleh suatu pemahaman konseptual untuk menangani masalah terorisme. Konsep ini merefleksikan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam penanggulangan terorisme. Strategi yang sebelumnya sangat didominasi oleh *hard power* menjadi keseimbangan yang sinergis dengan *soft power*. Kata deradikalisasi berasal dari kosa kata bahasa Inggris, *radical* (*radix*= yang berkaitan dengan akar) dan *deradicalization*.⁷²

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan, meniadakan atau paling tidak menetralisasi radikalisme. Di dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Namun demikian, istilah deradikalisasi juga mempunyai perkembangan arti. Kata tersebut diartikan sebagai pemutusan atau *disengagement* dan deideologisasi atau *deideologization*. Pemutusan berarti meninggalkan atau melepaskan aksi terorisme atau tindakan kekerasan. Hal ini berarti deradikalisasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan reorientasi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh John Horgan, yakni bahwa pemutusan adalah perubahan-perubahan sosial dan kognitif dalam arti meninggalkan berbagai norma sosial, nilai, perilaku dan aspirasi yang diikuti bersama dengan suatu cara yang hati-hati sementara individu yang bersangkutan masih menjadi seorang anggota dari suatu jejaring teroris.⁷³

Pengertian deradikalisasi yang berarti kontra ideologi umumnya mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi yang dimiliki teroris. Deradikalisasi menjadi suatu kegiatan yang lebih

⁷¹ Dhyah Madya Ruth, *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Radikalisme* (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010), 2.

⁷² Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), 81.

⁷³ John Horgan, *Journal of the Terrorism Research Initiative*, 2010, 82

fokus pada netralisasi pengaruh pemikiran radikal, sehingga ia juga memiliki tujuan kontra radikalisme. Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), deradikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, pendidikan dan ekonomi.⁷⁴

Pengertian deradikalisasi yang telah disebutkan di atas memang cenderung digunakan dalam kebijakan pemerintah untuk melawan teroris. Namun, pada dasarnya masih perlu upaya pengembangan lebih jauh agar lebih inklusif dan tidak terbatas pada kelompok teroris atau mantan teroris. Hal ini disebabkan bahwa upaya netralisasi ideologi pada hakikatnya adalah upaya memperkuat benteng pertahanan ideologis dari warga Negara, terutama sebagai penetrasi terhadap pengaruh ideologi radikal yang dibawa dan dipropagandakan oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat juga merupakan sasaran program deradikalisasi, bahkan harus lebih diintensifkan dan diperluas sosialisasinya sebagai bentuk tindakan preventif sejak dini.

Dalam pelaksanaan program deradikalisasi yang dimulai pada tahun 2005, sasaran yang diutamakan adalah para tawanan teroris dan keluarganya. Masyarakat sipil yang dilibatkan adalah kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang langsung memiliki hubungan dengan ideologi radikal. Misalnya saja seperti ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam, baik yang berafiliasi dengan kelompok moderat, modernis maupun fundamentalis. Menurut Golose, program deradikalisasi memiliki enam tujuan yaitu 1) melakukan *counter-terrorism*, 2) mencegah proses berkembangnya radikalisme, 3) mencegah adanya provokasi, penyebaran kebencian, dan permusuhan antar umat beragama, 4) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, 5) meningkatkan pengetahuan

⁷⁴ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: YPIKIK, 2010), 85.

masyarakat untuk menolak paham teror, 6) memperkaya pemahaman atas khazanah perbandingan paham.⁷⁵

Keberadaan dan peran masyarakat sipil dalam sejarah Indonesia memang cukup panjang, bahkan sebelum kemerdekaan dicapai. Masyarakat sipil Indonesia (MSI) modern dapat dikatakan mulai tumbuh bersamaan dengan munculnya organisasi dan gerakan-gerakan mandiri dalam masyarakat kolonial ketika proses industrialisasi diperkenalkan. Benih-benih MSI modern tersebut juga telah ada dan dapat ditemukan dalam tradisi budaya yang menunjukkan ciri-ciri kemandirian, keswasembadaan dan kesukarelaan. Sebagai contohnya tradisi *lumbung desa*, tradisi *tanah perdikan*, lembaga pendidikan pesantren, budaya gotong royong, arisan, musyawarah desa, dan lain sebagainya. Benih-benih tradisi seperti inilah yang menjadi dasar munculnya etos kemandirian dan ketahanan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menghadapi tekanan dan ancaman pihak luar pada situasi dan kondisi krisis, baik yang datang dari alam maupun buatan manusia. MSI modern berkembang yang bermula dari masa penjajahan memiliki akar budaya asli Indonesia yang berfungsi sebagai wahana persemaian gagasan dan gerakan nasionalisme, anti kapitalisme dan juga semangat anti penjajahan.⁷⁶

Deradikalisasi akan berjalan baik dengan adanya landasan budaya yang memiliki perspektif multikulturalisme. Melalui pemahaman multikulturalisme diharapkan tidak ada lagi berbagai stereotip yang membedakan secara tajam antara, kami dan ,mereka, di mana ,kami adalah yang unggul atau superior, sedangkan, mereka adalah *asor/hina*. Karena menurut Parsudi Suparlan melalui perspektif multikulturalisme akan tercipta persamaan hak antar kelompok- kelompok suku, bangsa, ras, gender dan agama.⁹⁶

Santri yang identitasnya identik dengan semangat keagamaan memiliki kedudukan tersendiri. Ia cenderung mudah untuk menerima

⁷⁵ *Ibid.*, 116.

⁷⁶ Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian* (Jakarta: YKIK, 2008), 347.

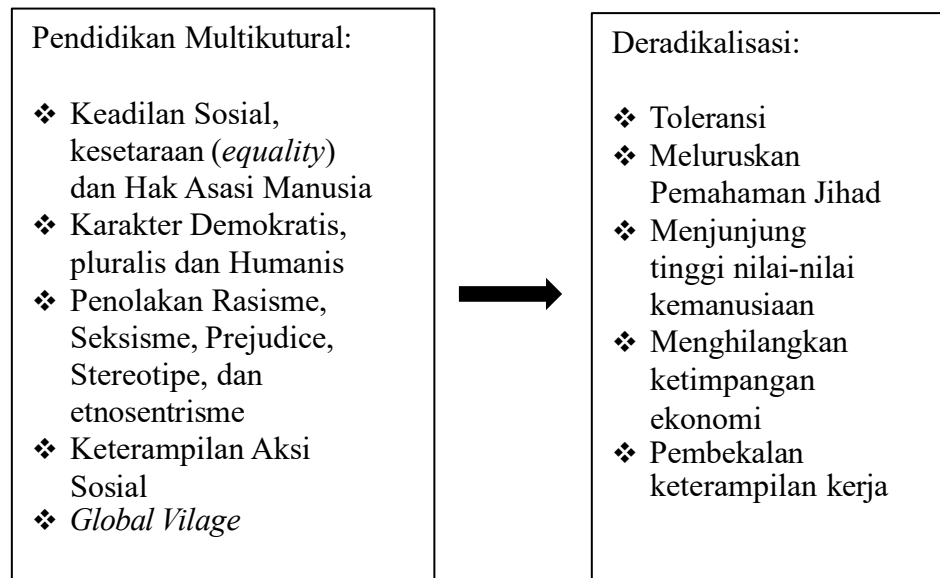
doktrin agama dan dengan kuat memegang doktrin itu. Sementara, sejatinya doktrin agama yang diasumsikan oleh beberapa gelintir orang merupakan faktor internal dan eksternal dalam menyebabkan konflik sosial, justru memiliki semangat multikulturalisme. Pernyataan ini selalu mengusik ketika agama dipahami sebagai pemicu permasalahan sosial yang perlu dihindari dalam pembangunan sosial dan kebudayaan atau peradaban bangsa. Bahwa secara teologis sebenarnya agama tidak mengajarkan berbuat keburukan yang bertolak belakang dengan semangat multikulturalisme. Namun, jika ada pemeluk agama yang berbuat keburukan, hal itu bukan karena ajaran agama yang salah. Melainkan pemeluk agama yang gagal paham terhadap ajaran agama. Sepaham dengan pernyataan Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa, penganut agama yang berbuat radikal atas nama agama bukan karena ajaran agama yang radikal. Melainkan penganut agama tersebut yang salah mengartikan ajaran agama.⁷⁷

Multikulturalisme dengan sendirinya akan mengantarkan kepada terjadinya deradikalisasi agama. Proses deradikalisasi adalah proses pembalikan dari radikalisasi. Radikalisasi dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Sedangkan proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi ajaran-ajaran agama Islam, fokus penanganan terpadu, *disengagement* dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.⁷⁸

⁷⁷ Franz Magnus Suseno, *Religious Harmony in Religious Diversity: The Case in Indonesia*, in *Religious Harmony: Problems, Practice and Education*, ed. Micahel Pye, Edith franke, Alef Theria Wasim, and Abdurrahman Mas'ud (Berlin: Walter de Gruyter GmbH & co, 2006), 27-34

⁷⁸Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpun* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu, 2009), 63

Tabel 1.2
Hubungan Pendidikan Multikultural dengan Deradikalisasi



Abdurrahman Kasdi mengungkapkan bahwa pada dasarnya, watak dan karakter pesantren yang apresiatif terhadap kebudayaan lokal adalah watak yang damai, ramah dan toleran. Karena watak pesantren yang demikian ini, tidak menyuguhkan praktek kekerasan (*penetration pacifigure*) untuk mendialogkan pesantren dengan kebudayaan lokal.⁷⁹

Setidaknya, seorang santri telah mengetahui dan menyadari bahwa contoh sikap yang selaras dengan paham multikultural telah diimplementasikan oleh Rasulullah saw. melalui konsep masyarakat madani di Madinah. Mulyadhi Kartanegara menguraikan nilai-nilai madani multikultural yang menyokong tegaknya masyarakat kosmopolitan meliputi: pertama, *inklusivisme*, yaitu keterbukaan diri terhadap unsur luar melalui kemampuan melakukan apresiasi dan seleksi secara konstruktif. Kedua, *humanisme*, dalam artian cara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya, tidak karena sebab lain di luar itu, semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama.

⁷⁹ Abdurrahman Kasdo, *Pendidikan Multikultural di Pesantren, Membangun Kesadaran Keberagaman Yang Inklusif*, Jurnal Ad-Din, Vol. 4, No. 2, Juli- Desember (2012), 211-222.

Termasuk ke dalam *humanisme* di sini adalah sifat *egaliter* yang memandang manusia sama derajatnya. Ketiga, toleransi, yaitu adanya kelapangdadaan dan kebesaran jiwa dalam menyikapi perbedaan. Keempat, demokrasi yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan penyampaian kritik.⁸⁰

Dalam konteks aktor radikalisme, wacana yang berkembang dipahami sebagai sekelompok orang yang kebanyakan terdidik dari pendidikan pesantren. Akibatnya, tumbuh dalam pemahaman publik bahwa pesantren merupakan tempat pendidikan bagi calon teroris. Fakta ke-Indonesia-an menunjukkan bahwa pendidikan pesantren tidak mengajarkan tentang radikalisme. Isu radikalisme yang mengaitkannya dengan pesantren telah membuat opini publik terhadap pesantren menjadi buruk. Keberadaan kurikulum pengajaran seringkali menjadi faktor utama keterlibatan pesantren dalam radikalisme.⁸¹

Santri adalah bagian dari pesantren, ia merupakan harapan output dan outcome yang akan merealisasikan segala visi misi pesantrennya. Untuk mengcounter, menetralisasi atau bahkan menghilangkan stigma tentang pesantren sebagai tempat pengkaderan teroris, maka perlu adanya upaya memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang aksi-aksi radikal, teror, konsep *tawassuth* (tidak memihak atau moderasi), *tasammuh* (toleransi), *tawazun* (menjaga keseimbangan dan harmoni), *tashawwur* (musyawarah), *adl* (bersikap adil dalam beraksi maupun bereaksi), dan pemahaman Islam sebagai agama *rahmatan li al'alam*.

Pesantren mempunyai sikap konsisten dalam menjalankan ajaran Islam secara substantif dan inklusif-humanis sesuai kondisi lokalitas-kultural Islam Indonesia yang damai.⁸² Pesantren sebagai ujung tombak

⁸⁰ Mulyadhi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons Terhadap Modernitas* (Jakarta: Erlangga, 2007), 80-91.

⁸¹ Nuhrison M. Nuh (ed), *Peranan Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), 3.

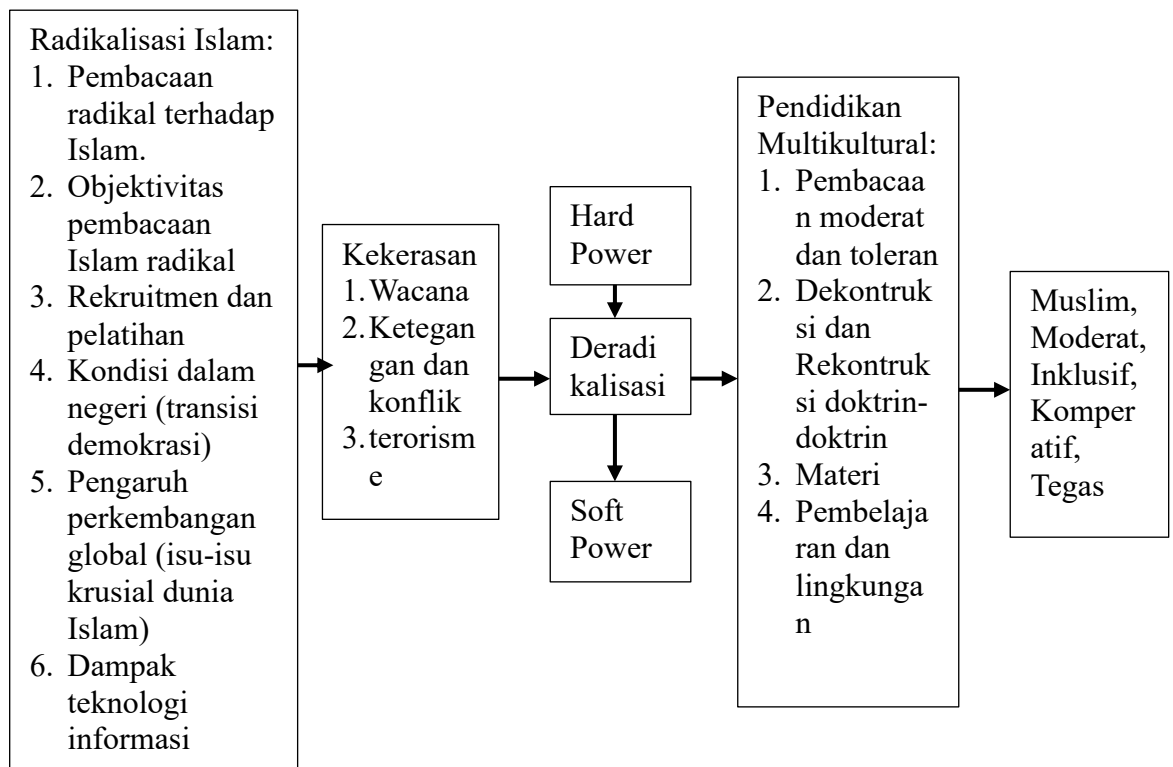
⁸² Terminologi Pesantren mengidentifikasi bahwa pesantren secara kultural lahir dari budaya Indonesia, dari sinilah barangkali Nurcholis Madjid berpendapat secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Lihat, Yasmadi,

syi'ar Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* memiliki visi yang lebih jauh, yaitu menciptakan perdamaian antar sesama manusia dan toleran terhadap berbagai macam perbedaan. Dengan demikian radikalisme bukanlah bagian dari ajaran agama Islam, dan bukanlah sebagai sebuah ajaran yang dikembangkan oleh pesantren.

Bila dibuat suatu konseptualisasi, maka model pendidikan ini dapat disebut dengan model pendidikan multikultural. Dengan demikian dapat dipertegas di sini, model pendidikan yang perlu dikembangkan dalam rangka deradikalisasi adalah model pendidikan multikultural. Model deradikalisasi melalui pendidikan multikultural selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah.⁸³

Gambar 1.3

Model Deradikalisasi Lewat Pendidikan



Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 62.

⁸³ Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, (Depok: Koekoesan, 2010), 4

5. Profil Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri mulai berdiri sejak tahun 1925. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso terletak desa Ploso, 15 km dari arah selatan Kediri. Pondok ini didirikan oleh KH. Achmad Djazuli Ustman. Pondok ini telah berkontribusi bagi Dunia, khususnya negara republik Indonesia. Terlebih ketika masa awal kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diawal keberadaanya, pondok ploso ini terlibat aktif dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa indonesia dan telah menghasilkan ribuan alumninya yang telah tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Dan selama kurun waktu 100 tahun berjalannya pondok pesantren ini, telah berkembang dari satu pondok pesantren yang hanya berawal dari sebuah tempat mengaji anak-anak di mushola telah berkembang menjadi banyak cabang asrama dan tentu saja memiliki para pemimpin yakni Kiai di masing-masing cabang pondok pesantren Al Falah. Adapun pondok-pondok pesantren Al Falah yang eksis hinga saat ini yakni Pondok Induk Al Falah, Pondok Al Falah II, Pondok Al Falah Putri, Pondok Nurul Falah, Pondok Queen Al Falah, Pondok al Badrul Falah, Pondok Tarbiyatul Qur'an (PPTQ) Al Falah, Manhajul Qur'an (MQ), Pondok Tuhfatul Athfal, Pondok Tabassam Al Falah dan Pondok DNE (Ndalem Ning Eva).

Sejak awal berdirinya sampai hari ini pondok pesantren Al Falah masih tetap eksis mempertahankan status salafiyahnya yang kental, seakan tidak tergoda dengan dinamika Pendidikan pesantren yang berkembang akhir-akhir ini. Al Falah masih mempertahankan kelestarian kelasafan tradisionalnya dengan pengajian metode kitab kuning yang kental dan menjadikan kemampuan pengkajian kitab kuning sebagai distingsi keilmuan pesantrennya. Perkembangan jumlah santri yang masuk di pondok induk maupun pondok cabang

lainnya-pun setiap tahun selalu mengalami kenaikan kuantitas santrinya. Tampaknya, derasnya arus modernisasi tidak terlalu menghambat laju perkembangan pesantren salaf seperti Al Falah Ploso.

Namun demikian, fakta bahwa saat ini pondok pesantren Ploso telah melakukan dinamisasi pengembangan pondok pesantrennya tidaklah bisadipungkiri. Terbukti sejak tahun 1992 telah mulai membuka cabang sekolah formal yakni pada salah satu cabang dari Pesantren Al Falah yakni yang terkenal dengan nama pondok pesantren Queen Al Falah. Keputusan pembukaan sekolah formal ini diilhami oleh adanya mimpi oleh pendiri Queen Al Falah yang bermimpi bertemu ibunya dalam mimpi dan diminta untuk membuka sekolah formal. Hingga kini Queen Al Falah berkembang pesat dengan memiliki lebih dari 2500 santri di dalam pondok pesantren Queen tersebut.⁸⁴ Kemudian fenomena seakan wafatnya pengasuh sebelumnya dan digantikan oleh penerusnya yang masih sangat muda juga tidak mempengaruhi pertumbuhan pesantren Al Falah Queen terbukti dengan adanya penambahan kuantitas santrinya.

Karena perubahan cepat di Queen Al Falah, sehingga terjadinya ketimpangan jumlah santri yang sehingga untuk mengimbangi eksistensi pondok cabang lainnya, akhirnya pondok Al Falah cabang lainnya pun saat ini juga telah mengakomodir santri yang tetap menginginkan bersekolah formal di sekitar pondok pesantren, yakni antara lain beberapasantri diperbolehkan sekolah di SMP dan SMA Negeri atau Swastaterdekat. Inilah salah satu bukti bahwa pondok pesantren Al Falah secaratelah melakukan dinamisasi transformasi ke arah moderen walaupun memang tetap memegang teguh status utamanya sebagai pesantren bermodel salafiyah ala *ahlusunnah waljamaahnya*. Sehingga memang menarik untuk dikaji

⁸⁴ Profil Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, <https://alfalahploso.net/profil/sejarah/>, 12 Juni 2020
Diakses tanggal 2 Juli 2023

terkait anomali kesalafan Al Ploso saat ini, dan perubahan-perubahannya dalam menghadapi realitas sosial saat ini.

Pondok Pesantren Al Falah telah melakukan inovasi sistem pendidikan dari sistem tradisional (non klasikal) berupa pengajian sorogan dan wetonan, kemudian ditambahkan dengan sistem pendidikan klasikal (Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, serta Riyadlotut Tolabah). Kedua, faktor penunjang penguasaan kitab kuning: komitmen Kiai yang tinggi, kompetensi ustadz, input santri yang berkualitas, efektifitas kurikulum yang digunakan, tingginya kitab-kitab kuning yang digunakan, sarana dan dana yang menunjang.⁸⁵

b. Visi Misi Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dari lulusan setiap lembaga pendidikan, maka Pondok Pesantren Al-Falah merumuskan visi, misi dan tujuan. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al Falah adalah sebagai berikut:⁸⁶ Visi: Lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang sejak berdirinya tetap mempertahankan konsep salafiyah dengan menganut thoriqoh ta'lim watta'alum, senantiasa menjadi rujukan pengembangan ke-Islaman dan dakwah multikultural.

Kemudian misi Pondok Pesantren Al Falah Ploso yakni (1) Mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib*, (2) Meningkatkan kompetensi lulusan pondok pesantren melalui pembekalan moral, skill dan penguatan di bidang ilmiah-amaliyah dan amaliyah-ilmiah.

c. Organisasi Kelembagaan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Pondok Pesantren Al Falah Ploso menganut sistem

⁸⁵ Harisuddin Masrof, (2020). *Metode Pembelajaran CBSA di Pondok Pesantren salaf dalam memahami teks agama islam klasik di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 29-31

⁸⁶ Profil Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, <https://alfalahploso.net/profil/sejarah/>, 12 Juni 2020
Diakses tanggal 2 Juli 2023

manajemen tradisional, dalam arti, kepemimpinan tunggal yang tersentral pada figur seorang kiai memegang otoritas yang tinggi dalam pengelolaan pesantren. Manajemen semacam itu terus berlangsung sampai pada saat sekarang saat pesantren ini diasuh oleh KH. Zainuddin Djazuli, putra Kiai Djazuli. KH. Zainuddin dalam mengasuh pesantren yang sering digunakan kegiatan tingkat regional ini dibantu para adik-adiknya dan saudara-saudaranya, seperti KH. Nurul Huda Djazuli yang mengasuh pondok pesantren putri, KH. Fuad Mun'im Djazuli, KH. Munif Djazuli, Bu Nyai Hj. Badriyah Djazuli dan Gus Sabuth putra almarhum Gus Miek (yang mengomandani Jama'ah Sima'an Al-Qur'an Mantab).

Dalam sejarah kepemimpinan pondok pesantren Al-Falah Ploso, periode pertama berdirinya dipimpin oleh KH. A. Djazuli Usman, tapi kemudian ketika beliau meninggal tahun 1976 maka kepemimpinan Pondok pesantren Al Falah Ploso periode ke dua dipimpin secara kolektif oleh anak-anaknya yaitu: 1. KH. Zainuddin Djazuli, 2. KH. Nurul Huda Djazuli, 3. KH Chamin Djazuli, 4. KH. Fuad Mun'im Djazuli, 5. Alm. KH. Munif Djazuli, 6. Bu Nyai Hj. Badriyah Djazuli. Kalau dulu pada periode pertama seluruh kebijakan pesantren berada di tangan KH Alm Djazuli, maka pada periode ke dua seluruh kebijakan pesantren diputuskan secara sistem kolektif. Kepemimpinan didelegasikan dalam bentuk dewan dan sub bidang yang melibatkan selain anak dan cucu KH Djazuli juga merangkul para alumni. Hal ini berbeda dengan kebanyakan tipe pesantren salafiyah yang biasanya berbentuk kepemimpinan tunggal ada di tangan Kiai.⁸⁷

d. Pondok Cabang Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Sebagai catatan, Pondok Pesantren Al Falah Ploso pada awalnya didirikan pada tahun 1925 dengan hanya satu pondok induk.

⁸⁷ Ibid..

Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah santri di induk dan perkembangan perluasan, Pondok Pesantren Al Falah Ploso kemudian mengembangkan banyak cabang. Saat ini, cabang-cabang Pondok Pesantren Al Falah Ploso dikelola oleh para dzurriyah Kiai Djazuli dan tersebar di beberapa lokasi di Desa Ploso, yakni:⁸⁸

1) Al-Falah Putri

Al Falah Putri adalah pondok pesantren yang secara khusus ditujukan untuk para santri putri, yang dipimpin oleh KH. Nurul Huda Djazuli. Seperti halnya dengan Al Falah induk, para santri putri di Al Falah juga tidak mengikuti pendidikan formal, namun mereka belajar di Madrasah MISRIU lil banat. Awalnya, pondok putri terletak di belakang ndalem kasepuhan atau pendopo, berada pada lokasi yang sama dengan ndalem Ibu Nyai Hj. Marwiyatus Sholihah. Namun, seiring perkembangannya, lokasi pondok putri dipindahkan ke utara pondok induk, sekitar kurang lebih 100 meter sebelah barat jalan. Saat ini, di dalam kompleks pondok Al Falah Putri terdapat beberapa unit pondok pesantren:

- a) Al-Falah Putri, untuk para santri putri salaf
- b) MQ, untuk santri putri yang menghafal Al-Qur'an
- c) Tsuroyya, untuk santri putri yang bersekolah formal.
- d) Az Zahir, untuk santri putra yang bersekolah formal.

Dalam perkembangannya, Pondok Al-Falah Putri tidak hanya menerima santri yang mengikuti pendidikan salaf, tetapi juga menerima santri yang bersekolah formal baik putra maupun putri. Hal ini menunjukkan bahwa pondok tersebut memberikan kesempatan bagi santrinya untuk mengenyam pendidikan formal sekaligus pendidikan agama salam di lingkungan pondok pesantren.

⁸⁸ Wawancara, Rozimun guru Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, 23 Mei 2024

2) Al-Falah II

Pondok Al Falah II, sebagai salah satu cabang dari pondok Al Falah, didirikan pada tahun 1985 oleh KH. Ahmad Zainuddin Djazuli, putra pertama dari almarhum KH. Ahmad Djazuli Utsman. Lokasinya terletak 100 meter sebelah selatan pondok induk. Awalnya, Pondok Al Falah II beroperasi sebagai pondok salaf, mengikuti model pendidikan dari pondok induknya. Para santri mengaji pengajian wajib yang diasuh oleh para Masyayikh Al Falah, dan pada pagi harinya mereka menempuh pendidikan di MISRIU AlFalah.

Namun, beberapa tahun terakhir, Al Falah II mulai menerima santri yang bersekolah formal. Langkah ini diambil untuk menjawab harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pondok pesantren Al Falah, sekaligus untuk mencetak santri-santri yang multifungsi, yang tidak hanya menguasai ilmu agama salaf, tetapi jugamendapatkan pendidikan formal.

Para santri Al Falah II yang mengenyam pendidikan formal tersebar di beberapa sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Mojo, baik tingkat SMP/MTs maupun SMA/Aliyah. Beberapa sekolah yang menjadi pilihan para santri Al Falah II antara lain: SMAN 1 Mojo, MA Sunan Kalijogo, SMA Queen Al Falah, SMK Queen Al Falah, SMPN 1 Mojo, SMPN 2 Mojo, MTs Sunan Kalijogo, dan MTs Sunan Muria. Meskipun mereka mengikuti pendidikan formal, kegiatan santri tersebut tetap melibatkan aktivitas agama seperti mengaji, sorogan, dan bandongan. Selain itu, mereka juga wajib mengikuti sekolah diniyah di MISRIU Al Falah II. Saat ini, jumlah santri Al Falah II sekitar 500 orang dengan tersedia 35 kamar. Meskipun sebagian dari mereka mengikuti pendidikan formal, pondok ini tetap

mempertahankan tradisi dan kegiatan kepesantrenan bagi semua santrinya.⁸⁹

3) Nurul Falah

Nurul Falah, dulunya dikenal sebagai pondok Ndalem Yai Fuad (DYF), adalah pondok pesantren yang dipimpin oleh KH. Fuad Mun'im Dzajuli. Terletak sekitar 50 meter di sebelah utara pondok induk, berdekatan dengan Poliklinik Pesantren (POLITREN) Al Falah. Di pondok ini, terdapat santri putra dan putri, baik yang mengikuti pendidikan salaf maupun yang mengikuti pendidikan formal.⁹⁰

4) Queen Al-Falah

Pondok pesantren Queen Al-Falah terletak di Kelurahan Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di sekitar sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar di Kediri. Kompleks pondok ini berada di sebelah barat pondok induk Al-Falah, menempati lahan seluas sekitar 1.780 m², dengan jarak sekitar 250 meter dari pondok induk. Pendirian Pondok Pesantren Queen Al-Falah dilakukan oleh KH. Munif Djazuli sebagai cabang dari pondok pesantren Al Falah induk, sesuai dengan wasiat dari Simbah Nyai Rodliyah Djazuli. Rencana pendirian pondok ini dimulai pada tahun 1992 dan pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama pada tahun 1994-1995, yang ditandai dengan pembangunan pagar pondok.⁹¹

Pondok Pesantren Queen Al Falah secara administratif terbentuk pada periode tahun 1996-1997. Pada awalnya, pondok tersebut hanya memiliki 3 kamar dengan jumlah santri sebanyak 35 orang. Di Pondok Pesantren Queen Al-Falah, santri tidak hanya mendapatkan pendidikan agama seperti di pesantren

⁸⁹ Ibid..

⁹⁰ Ibid..

⁹¹ <https://www.queenalfalah.id>. 22 September 2024.

tradisional, tetapi juga mendapatkan pendidikan umum setara dengan SMP/SMA/SMK yang tersebar di wilayah kecamatan Mojo. Pihak pondok berupaya menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa santri Queen mengenyam pendidikan di SDN Ploso (Kelas 5-6), SMPN 1 dan 2 Mojo, MTS SKJ Mayan, serta MTS Sunan Muria Ploso.

Seiring dengan pertumbuhan Pondok Pesantren Queen Al Falah yang semakin pesat dari hari ke hari, jumlah santri juga meningkat secara signifikan. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terkait dengan etika kepesantrenan. Mengingat jarak yang harus ditempuh oleh para santri, pihak Pondok Pesantren memutuskan untuk memusatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal setingkat SMP dan SMA hanya di wilayah kecamatan Mojo.

Faktanya, perkembangan zaman yang semakin maju, terutama dengan masuknya era milenium, menuntut setiap individu untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di tengah realitas ini, penting untuk diingat bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan keimanan dan ketaqwaan. Tanpa hal tersebut, seseorang bisa terjerumus ke dalam jurang kenistaan.

Seiring perkembangannya, Pondok Pesantren Queen Al-Falah mendirikan Lembaga Pendidikan Formal SMP, SMA, dan SMK Queen Al Falah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al Muttaqien. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan

pendidikan yang semakin kompleks dan beragam di masyarakat.⁹² Salah satu dasar pendirian Yayasan Pendidikan

⁹² Profil Pondok Pesantren Queen Al-Falah, <https://www.queenalfalah.id/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

Islam Al Muttaqien adalah untuk mengatasi tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta dalam respons terhadap meningkatnya tingkat kenakalan remaja di wilayah Kabupaten dan Kota Madya pada usia setingkat SMA. Hal ini menjadi kekhawatiran karena dapat berdampak pada etika kepesantrenan di lingkungan Pondok Pesantren Queen Al-Falah. Oleh karena itu, didirikanlah Yayasan Pendidikan Islam Al Muttaqien sebagai wadah bagi pendirian lembaga pendidikan setingkat SMA dan SMK.

Pondok Pesantren Queen Al-Falah adalah bentuk pengabdian KH Munif Djazuli kepada ibunya yang tercinta, Nyai Radliyah Djazuli. Nama "*Queen*" diambil dari potongan ayat, "*Quu anfusakum wa ahliikum naroo*", yang dijelaskan oleh Kiai Munif. Menurut Ning Eva, nama "*Queen*", yang berarti "ratu", dipilih untuk menghormati para pemegang Al Qur'an, memuliakan ibu dan wanita, sehingga mereka dianggap sebagai ratu. Hal ini membuat Pondok Pesantren Queen Al-Falah menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh berbagai kalangan, baik pelajar maupun non- pelajar. Di Pondok Pesantren Queen, para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mendapatkan pengetahuan umum seperti yang diperoleh di lembaga pendidikan formal.

Hingga saat ini, jumlah santri putra dan putri yang aktif belajar dan mengaji di pesantren ini mencapai tidak kurang dari 2000 an orang. Sesuai dengan namanya, "*Queen*" yang berarti "Ratu," mencerminkan figur "Ratu" dari Al Falah, yaitu Simbah Nyai Rodliyah Djazuli, karena pendirian pesantren ini dipengaruhi olehnya. Setelah KH. Munif Djazuli meninggal, kepemimpinan Pondok Queen Al Falah dilanjutkan oleh putranya, yaitu KH. Ahmad Hasby.

5) Al-Badrul Falah

Pesantren ini terletak sekitar 150 meter ke selatan dari pondok induk. Didirikan oleh satu-satunya putri pendiri Al Falah, yaitu Ibu Nyai Hj. Lailatul Badriyah Djazuli. Pondok Pesantren ini menerima santri dari berbagai usia. Terdapat asrama untuk putra baik anak-anak maupun dewasa, serta asrama untuk putri anak-anak maupun dewasa. Di sini, para santri menerima pendidikan dalam berbagai jenjang. Ada yang menempuh pendidikan formal mulai dari SD hingga SMA, juga santri yang mengikuti pendidikan salaf di MISRIU, dan bahkan ada yang mengikuti program *Tahaffudul Qur'an*.⁹³

6) Tarbiyatul Qur'an

Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an (PPTQ) Al Falah terletak 100 meter sebelah barat dari pondok induk. Didirikan dan dipimpin oleh KH. Umar Faruq, yang merupakan putra dari KH. Ahmad Zainuddin Djazuli. Sejak awal berdirinya, PPTQ telah dikenal sebagai pondok tahfidz yang khusus ditujukan bagi santri perempuan. Namun, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para santri putri tentang isi Al-Qur'an dan ilmu alat yang mendukungnya, diselenggarakan program madrasah melalui MISRIU PPTQ Al Falah.

Seiring berjalannya waktu dan dengan banyaknya harapan dari wali santri untuk membuka jenjang formal, PPTQ mulai menerima santri yang mengikuti program tahfiz Al-Qur'an sambil menjalani pendidikan formal di sekolah-sekolah di sekitar kecamatan Mojo. Tujuan dari pembukaan jenjang tersebut adalah untuk melahirkan santri putri yang memiliki kemampuan multifungsi.

⁹³ Wawancara, Rozimun guru Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, 23 Mei 2024

7) Manhajul Qur'an

Pondok Pesantren Manhajul Qur'an terletak di Dusun Kepet, sekitar 500 meter sebelah barat dari pondok induk. Didirikan dan dipimpin oleh KH. Mustofa Hadi, yang dikenal sebagai Gus Tofa, bersama dengan istrinya, Ning Hj. A'thi Inayati atau Ning Tatik. Awal mula pendirian pesantren ini berasal dari kegiatan sorogan Al-Qur'an di Ndalem Gus Tofa oleh para santri Al Falah dan anak-anaksekitar Ploso, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada tahun 2004, mulai ada santri yang tinggal di Ndalem Gus Tofa untuk belajar dan mendalami Al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah santri yang tinggal, pembangunan pesantren dimulai pada tanggal 30 Oktober 2013. Secara administratif, pesantren ini diresmikan pada periode tahun 2013-2014 M dengan 2 kamar dan sekitar 27 santri pada awal pembentukannya.

8) Tuhfatul Athfal

Pondok pesantren ini berlokasi paling jauh dari pondok induk. Terletak di Dusun Baran, Desa Maesan, sekitar 2,7 Kilometer di sebelah barat daya pondok induk. Didirikan oleh KH. Athoillah, yang akrab disapa Gus Atho'. Pondok ini menjadi tempat tinggal bagi santri anak-anak mulai dari tingkat TK hingga SD.

9) Tabassam Al-Falah

Pondok pesantren Tabassam terletak di dusun Tanjang, Desa Ploso, sekitar 400 meter di sebelah barat Balai Desa Ploso. Didirikan oleh KH. Mohammad Ma'mun, atau yang akrab disapa Gus Ma'mun, Putra dari Ibu Nyai Hj. Lailatul Badriyah Djazuli dan KH. Mahfudz Sirojd. Sebelum pendirian pesantren ini, Gus Ma'mun telah aktif mengadakan kegiatan Ta'lim dan Ta'allum bersama anak-anak di sekitar desa Ploso. Seperti halnya

keturunan Kiai Djazuli lainnya, ia tekun dalam membangun pendidikan agama. Secara bertahap, mulai ada santri yang tinggal dirumahnya, dan akhirnya dibangunlah asrama untuk para santri.⁹⁴

10) DNE (Ndalem Ning Eva)

Pondok Pesantren DNE terletak di sebelah barat Pondok Tabassam. Didirikan dan dikelola oleh Ning Hj. Eva Munaifah Djazilah, atau yang akrab disapa Ning Eva, bersama suaminya, Gus H. Aris Dwi Khoiron. Selain menjadi tempat pendidikan keagamaan, pondok ini juga tengah mengembangkan sekolah formal hingga tingkat setingkat MTs.

⁹⁴ Wawancara, *Masrurin guru Pondok Cabang Tabassam Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 23 Mei 2024